



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk dipergunakan salah satunya sebagai pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu melakukan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai diperlukan pedoman dan acuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan /atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *colloncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
44. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
45. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
46. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
47. Rencana Penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
48. Pengesahan rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
49. Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnyadisingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
50. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakankegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi daerah.
53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk

- membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 57. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tarang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 58. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 59. Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 60. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 61. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah Surat Tanda Bukti Hak atas Status Kepemilikan Bangunan Gedung.
 62. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 63. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
 64. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 65. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
 66. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

67. Bupati adalah Bupati Banggai.
68. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Wilayah Pemungutan Pajak;
- d. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pemeriksaan;
- h. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
- i. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- j. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
- k. Penyidikan; dan
- l. Ketentuan Pidana.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Paragraf 1
Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (a) kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - (b) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - (c) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) untuk NJOP dibawah Rp 1. 000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) untuk NJOP Rp 1. 000.000.000.- (satu miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,13% untuk NJOP dibawah Rp 1. 000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- (4) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,14% untuk NJOP Rp 1. 000.000.000.- (satu miliar rupiah).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- (a) laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - (b) Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan



pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;

- e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalo* / *resort* / *cottage* / *Home Stay*, dan
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 28

PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame *film*/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah
Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang; dan
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang.

Pasal 46

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 52

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Opsen PKB
Pasal 53

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah Pemerintah Daerah bersangkutan yang berwenang memungut PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Opsen BBNKB Pasal 60

Objek Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 68

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (9) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut yaitu pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (11) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 70

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 72

- a. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- b. Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- c. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG Dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 77

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu layanan.

Pasal 78

Struktur dan Besaran tarif Retribusi atas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	TARIF PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER DAN ALTERNATIF				
1	Akupunktur	24,000	36,000	60,000	
2	Refleksi	24,000	36,000	60,000	
3	Akupresureur	24,000	36,000	60,000	
4	Pijat Urut	24,000	36,000	60,000	
5	Rumuan	24,000	36,000	60,000	
6	Belan	24,000	36,000	60,000	
7	Hipnotherapy	24,000	36,000	60,000	
8	Penata Kecantikan Kulit	24,000	36,000	60,000	
9	Aroma Terapi	24,000	36,000	60,000	
B.	TARIF PELAYANAN ORTHOSA PROTHESA				
I.	Upper Limb Orthose				
	1. Cock Up splint				
	Anak - Anak	500,000	750,000	1,250,000	Poly Propilyne
	dewasa	600,000	900,000	1,500,000	
	2. Dynamic Cock Up Splint				
	Anak - Anak	680,000	1,020,000	1,700,000	Poly Propilyne + Duralumine
	dewasa	600,000	900,000	1,500,000	
	3. Elbow Brace				
	Anak - Anak	880,000	1,320,000	2,200,000	Poly Propilyne + Duralumine
	dewasa	900,000	1,350,000	2,250,000	
	4. Wrist Support	600,000	900,000	1,500,000	Elastis
	5. Shoulder Support	400,000	600,000	1,000,000	Kain / Elastis
	6. Shoulder Brace	600,000	900,000	1,500,000	Poly Propilyne / Poly Etilyne
	7. Hand Splint / Back Slab				
	Anak - Anak	360,000	540,000	900,000	kain / Poly Propilyne / aluminium
	dewasa	600,000	900,000	1,500,000	
II.	Lower Limb Orthose				
	1. FO (Insole/ Medial Arch Support)	240,000	360,000	600,000	Spes + Oscar/Kain
	2. AFO Splint Static :				Poly Propilyne /

	Anak - Anak	480,000	720,000	1,200,000	poly Ethylene
	dewasa	720,000	1,080,000	1,800,000	
	3. AFO Splint Dynamic :				Poly Propylene / Poly
	Anak - Anak	600,000	900,000	1,500,000	Ethylene
	dewasa	760,000	1,140,000	1,900,000	
	4. KAFO Spint				Poly Propylene / Poly
	Anak - Anak	1,260,000	1,890,000	3,150,000	Ethylene
	dewasa	1,600,000	2,400,000	4,000,000	
	5. KAFO Brace Free Lock/Droop Lock				Duralumine + Stainless
	Anak - Anak	1,420,000	2,130,000	3,550,000	steel + SO / Poly
	dewasa	1,800,000	2,700,000	4,500,000	Propylene
	6. HKAFO Brace				Duralumine + Stainless
	Anak - Anak	1,840,000	2,760,000	4,600,000	steel + SO / Poly
	dewasa	2,100,000	3,150,000	5,250,000	Propylene
	7. Knee Brace				Duralumine + Stainless
	Anak - Anak	1,000,000	1,500,000	2,500,000	steel
	dewasa	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
	8. Sepatu Orthopaedic (SO)				Leather
	Anak - Anak	580,000	870,000	1,450,000	
	dewasa	720,000	1,080,000	1,800,000	
	9. AFO + Dennis Heven	760,000	1,140,000	1,900,000	Poly Propylene +
					Duralumine
	10. Knee Splint / Back Slab				Kain + Poly Propylene
	Anak - Anak	360,000	540,000	900,000	/ Aluminium
	dewasa	400,000	600,000	1,000,000	
	11. Abduction Brace	520,000	780,000	1,300,000	Poly Propylene/Poly
					Ethylene + Metal
III.	Trunk/Spinal Orthose				
	1. Night Collar Soft	300,000	450,000	750,000	Foam
	2. Night Collar Medium	620,000	930,000	1,550,000	Spous Rigid
	3. Cervical Collar Rigid	1,080,000	1,260,000	2,340,000	Poly Propylene / Poly
					Ethylene
	4. MSO/ Scoliosis Brace	2,880,000	4,320,000	7,200,000	Poly Propylene / Poly
					Ethylene
	5. Jewet / Extension Brace	900,000	1,350,000	2,250,000	Duralumine + Poly
					Propylene
	6. TLSO Brace	640,000	960,000	1,600,000	Duralumine+Poly
					Propylene+Elastis/kain
	7. Night Taylor/TLSO Korset	500,000	750,000	1,250,000	Duralumine + Elastis
					/ Kain
	8. Lumbal Brace	560,000	840,000	1,400,000	Poly Propylene +
					Duralumine
	9. Lumbal Korset	360,000	540,000	900,000	elastis + Kain +
					Aluminium
IV	Alat Bantu Mobilitas				
	1. Anjala Krueth*				
	Lokal	200,000	300,000	500,000	Aluminium
	Impor	300,000	450,000	750,000	Aluminium (Impor)
C	TARIF PELAYANAN BEDAH SYARAF				
1	TRANSFER MULTIPLE, GA	4,078,800	6,118,200	10,197,000	

2	TRANSFER TUNGGAL, GA	7,985,340	11,978,010	19,963,350
3	PLASTY, GA	7,985,340	11,978,010	19,963,350
4	EXPANTION, GA	5,003,460	7,505,190	12,508,650
5	ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA	8,339,760	12,509,640	20,849,400
6	ARTHROTOMY, GA	11,145,420	16,718,130	27,863,550
7	LAVAGE DENGAN C-ARM, GA	10,074,240	15,111,360	25,185,600
8	AL CARNAIL VAULT RECONSTRUCTION, GA	10,074,240	15,111,360	25,185,600
9	AL JOIB REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	16,329,060	24,493,590	40,822,650
10	AL JOIB REPLACEMENT WITH IMPLAN, GA	14,240,160	21,360,240	35,600,400
11	AL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DENGAN SKIN GRAP	10,074,240	15,111,360	25,185,600
12	ANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA	5,894,460	8,841,690	14,736,150
13	ANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA	16,329,060	24,493,590	40,822,650
14	ANSPLATATION PENIS, GA	16,329,060	24,493,590	40,822,650
15	RETHROPLASTY, GA	16,329,060	24,493,590	40,822,650
16	CONTENTOMY KASUS KELAS III, II+ KELAS I/II>2 GIGI	7,706,160	11,339,240	19,265,400
17	ASTIRPASI KISTA ODONTOGEN	2178000	3267000	5,445,000
18	EGUSTEREKTOMY/DECORTIKASI	2178000	3267000	5,445,000
19	PENUTUPAN FISTULA ORONTRAL	2178000	3267000	5,445,000
20	RANATOMI/TREPANASI KONVENSIONAL			0
21	NEOPLASMA/PROSES DESAK RUANG			0
22	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	18,849,600	28,274,400	47,124,000
23	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	10,612,800	15,919,200	26,532,000
24		6,336,000	9,504,000	15,840,000
25	PENYAKIT VASKULER	13,464,000	20,196,000	33,660,000
26	EPIDURAL/SUDURAL HEMATOMA	5,702,400	8,553,600	14,256,000
27	RANTOMI/TREPANASI BEDAH MIKRO			0
28	NEOPLASMA BASIS KRANIUM			0
29	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	18,849,600	28,274,400	47,124,000
30	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	16,315,200	24,472,800	40,788,000
31	AVM/ANEURISMA			0
32	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	16,315,200	24,472,800	40,788,000
33	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	13,464,000	20,196,000	33,660,000
34	TRANSPENDIDAL APPROACH			0
35	OPERASI ENDOSKOPI			0
36	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	14,731,200	22,096,800	36,828,000
37	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	12,038,400	18,057,600	30,096,000
38	OPERASI ENDOVASKULER			0
39	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	13,147,200	19,720,800	32,868,000
40	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	10,612,800	1,591,200	12,204,000
41	KORMIOPLASTI			0
42	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	8,395,200	12,592,800	20,988,000
43	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM EKTRAKSI IMPESI FAKTUR KOMPLIKATA (DISERTA)	5,385,600	8,078,400	13,464,000
44				0
45	LASERASI SEREBRI			0
46	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	11,246,400	16,869,600	28,116,000
47	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	5,702,400	8,553,600	14,256,000
48	REKONSTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL			0
49	KRANIAL ANTERIOR / POSTERIOR	5,702,400	8,553,600	14,256,000
50	EPINAL (SPINA BIFIDA)	7128000	10692000	17,820,000
50	PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG	7128000	10692000	17,820,000

51	TRUSI KORPUS VERTEBRA			0
52	APPROACH ANTERIOR	14,731,200	22,096,800	36,828,000
53	APPROACH POSTERIOR	7,761,600	11,642,400	19,404,000
54	LAMINEKTOMI			0
55	LAMINEKTOMI KOMPLEKS	7,761,600	11,642,400	19,404,000
56	LAMINEKTOMI SEDERHANA	5,702,400	8,553,600	14,256,000
57	TUMOR SPINAL			0
58	a. DAERAH KRANIOSERVIKAL	18,849,600	28,274,400	47,124,000
59	b. DAERAH SERVIKAL	18,849,600	28,274,400	47,124,000
60	c. DAERAH TORAKOLUMBAL	11,880,000	17,820,000	29,700,000
61	NEUROPLASTY/ ANASTOMOSIS & EKSPLORASI			0
62	A. BEDAH MIKRO			0
63	a. FLEKSUS BRAKIALIS	11,880,000	17,820,000	29,700,000
64	b. SARAF PERIFER	7,444,800	11,167,200	18,612,000
65	B. KONVERSIONAL	5,702,400	8,553,600	14,256,000
66	ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN			0
67	A.VENTRICULO ATRIUM (VA-SHUNT)	5,702,400	8,553,600	14,256,000
68	B.VENTRICULO PERITONIUM (VP-SHUNT)	4,752,000	7,128,000	11,880,000
69	COMPLICATED FUNCIONAL NEUROSURGERY			0
70	A.OPERASI STREOTAKTIK	14,097,600	21,146,400	35,244,000
71	B. PERKUTANEUS PARAVETERAL/VISERAL BLOK	5,227,200	7,840,800	13,068,000
72	C. PERKUTANEUS KORDATOMI	7,444,800	11,167,200	18,612,000
73	KOREKSI IMPRESI FAKTUR SEDERHANA	7,444,800	11,167,200	18,612,000
74	a. LAMA OPERASI LEBIH DARI 1 JAM	4,752,000	7,128,000	11,880,000
75	b. LAMA OPERASI KURANG DARI 1 JAM	4,435,200	6,652,800	11,088,000
76	PEMASANGAN FIKSASI INTERMA	7,128,000	10,692,000	17,820,000
77	PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF			0
78	NEUREKTOMI/ NEUROLISE	5,227,200	7,840,800	13,068,000
79	DEKOMPRESI SARAF PERIFER	4,752,000	7,128,000	11,880,000
80	RESEKSI LIGAMENTUM	4,752,000	7,128,000	11,880,000
81	SIMPLE FUNCIONAL NEUROSURGERY	4,752,000	7,128,000	11,880,000
82	a.PERKUTANEUS RHIZOTOMI (PROR)	4,752,000	7,128,000	11,880,000
83	b.PERKUTANEUS FACIET DENERVASI	7,444,800	11,167,200	18,612,000
84	EKSTIRPASI TUMOR	6,494,400	9,741,600	16,236,000
	A. EKSTIRPASI TUMOR JINAK KRANIUM	4,435,200	6,652,800	11,088,000
	B. EKSTIRPASI EKSTOSTOSE TULANG	4,435,200	6,652,800	11,088,000
84	VENTRIKULOSTOMI			
85	CONTINUOUS VENTRICULAR DRAINAGE	5,385,600	8,078,400	13,464,000
86	PEMASANGAN TRAKSI SERVIKAL	4,435,200	6,652,800	11,088,000
87	FUNGSI CAIRAN OTAK PER PAKET PENGOBATAN	3,484,800	5,227,200	8,712,000
88	BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT	2,034,400	3,801,600	6,336,000
89	BLOK SARAF PERIFER	3,484,800	5,227,200	8,712,000
90	NEUROTOLOGI			0
91	AUDIOLOGI NADA MURSI	297,000	445,500	742,500
92	TIMPANOMETRI	198,000	297,000	495,000
93	BERA NO	594,000	891,000	1,485,000
94	E.N.G KOMPUTER	990,000	1,485,000	2,475,000
95	TEST SISI/DECAY	396,000	594,000	990,000
96	AUDIGMETRI TUTUR	396,000	594,000	990,000
97	VIBRASI	297,000	445,500	742,500
98	FASIALIS N VIII	495,000	742,500	1,237,500

99	MUTOLOGRAFI NO	594,000	891,000	1,485,000	
100	TEST KESEIMBANGAN DENGAN FREZELS	495,000	742,500	1,237,500	
101	AUDIOMETRI TEST GLISEROL	495,000	742,500	1,237,500	
102	TERAPI REPOBISI OTOT	5,904,000	891,000	6,795,000	
103	AOE NO	396,000	594,000	990,000	
104	TEST KESEIMBANGAN SEDERHANA	296,800	445,200	742,000	
105	OTOLOGI			0	
106	IRIGASI LIANG TELINGA	198,000	297,000	495,000	
107	EKSTRASI BENDA ASING TELINGA	198,000	297,000	495,000	
108	INSIS ARSES	297,000	445,500	742,500	
109	BIOPSI (BIOPSI OTOLOGI)	198,000	297,000	495,000	
110	EKSTRASI JARINGAN GRANULASI	297,000	445,500	742,500	
111	PARASINTESIS	495,000	742,500	1,237,500	
112	OTOMIKROSKOPI DIAGNOSTIK	148,500	222,750	371,250	
D	TARIF TINDAKAN ANESTESI				
1	pemasangan CWV/Double lumen	600,000	900,000	1,500,000	ditindakan Dr Ahli
2	perawatan CWV/Double lumen/hari	20,000	30,000	50,000	
3	block Anastesi	400,000	600,000	1,000,000	
4	AB CWV/Double lumen	30,000	45,000	75,000	
5	heating tingkat I/II	140,000	210,000	350,000	
6	heating tingkat III/IV	400,000	600,000	1,000,000	ditangani Dr Ahli
7	penggunaan ventilator /pasien	600,000	900,000	1,500,000	1x Pemantauan
8	pemakaian oksigen/jam (HS)	6,000	9,000	15,000	3-5 liter/jam
9	memindahkan pasien ruangan ICU/ICCU	40,000	60,000	100,000	
E	TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)				
1.	Format Rekam Medik - Pembuatan Kartu Rekam Medik untuk Pasien Rawat Inap	30,000	20,000	50,000	
2.	Konsul Dokter Ahli (harus di Periksa)	60,000	40,000	100,000	
3.	Periksa dokter jaga	21,000	14,000	35,000	
4.	Tarif tindakan				
	- Skin Test	13,200	8,800	22,000	
	- Vena Sectie	320,400	213,600	534,000	
	- Spoeling lambung	98,400	65,600	164,000	
	- Resusitasi	450,000	300,000	750,000	
	- Reposisi Trondon	396,000	264,000	660,000	
	- Reposisi Fleksasi	64,800	43,200	108,000	
	- Pungkie Vesica Urinaria	180,000	120,000	300,000	
	- Perawatan Gangren	30,000	20,000	50,000	Perkali
	- Perawatan Post Op Hemoroid	16,200	10,800	27,000	Perkali
	- Pemasangan Spalk untuk Bayi / Anak	21,000	14,000	35,000	
	- Pemasangan Spalk untuk Dewasa	59,400	39,600	99,000	
	- Pemasangan Nebulizer	70,800	47,200	118,000	
	- Pasang kateter tanpa penyulit	33,000	22,000	55,000	Per 5 Hari
	- Pasang kateter dengan penyulit	90,000	60,000	150,000	Per 5 Hari
	- AB Kateter dengan penyulit	9,000	6,000	15,000	
	- APF Kateter	9,000	6,000	15,000	
	- Pasang NGT	76,200	50,800	127,000	
	- Pasang Sonde	54,000	36,000	90,000	
	- Pasang Infus Dewasa	24,000	16,000	40,000	
	- Pasang Gips (dihisar bahan)	310,800	207,200	518,000	

	- Levament	36,000	24,000	60,000	
	- Jahitan Luka (Per Hecting)	18,000	12,000	30,000	
	- All Hecting	12,000	8,000	20,000	
	- Insisi	115,800	77,200	193,000	
	- Cross Insisi	183,600	122,400	306,000	
	- Ganti Verbun (GV)	18,600	12,400	31,000	
	- Ekstraksi Kuku	150,000	100,000	250,000	
	- Dilatasi Vinosia / Anus	100,200	66,800	167,000	
	- Debridement Patah Tulang terbuka	70,800	47,200	118,000	
	- Debridement luka sedang	31,800	21,200	53,000	
	- Debridement luka ringan	16,200	10,800	27,000	
	- Circumisis	240,000	160,000	400,000	
	- Intubasi	150,000	100,000	250,000	
	- DC Shock	150,000	100,000	250,000	
	- Suction Lendir	12,000	8,000	20,000	Per hari
	- pemasangan infus pada bayi	36,000	24,000	60,000	
	- Injeksi Intravena	6,000	4,000	10,000	Per hari
	- Injeksi Intramuskular	6,000	4,000	10,000	Per hari
	- Injeksi Intracutan	6,000	4,000	10,000	Per hari
	- Injeksi Subcutan	6,000	4,000	10,000	Per hari
	- perawatan luka Carcinoma	60,300	40,200	100,500	
	- pemeriksaan Covid-19				
	- Antigen Sars Cov-2(Rapid Test)	60,000	40,000	100,000	
	- PCR/TCM Sars Cov-2	180,000	120,000	300,000	
	- perawatan luka				
	a. Luka Bakar/Kotor				
	- Kecil	24,900	16,600	41,500	
	- Sedang	39,000	26,000	65,000	
	- Besar	60,300	40,200	100,500	
	b. Luka Bersih				
	- Kecil	18,000	12,000	30,000	
	- Sedang	24,900	16,600	41,500	
	- Besar	32,100	21,400	53,500	
	c. Luka Khusus				
	- Ganggren	60,300	40,200	100,500	
	- Ulkus diabetik	60,300	40,200	100,500	
	- Carcinoma	60,300	40,200	100,500	
	- Decubitis	60,300	40,200	100,500	
	- Penggunaan Oksigen Per Jam	9,000	6,000	15,000	
	- Penggunaan Oksigen 1 Tabung	180,000	120,000	300,000	
	- Penggunaan Selang Oksigen	16,200	10,800	27,000	
5.	Observasi (2 jam s/d 8 Jam)	60,000	40,000	100,000	
6.	Rawat Sehat (One Day Care)	90,000	60,000	150,000	
7.	Transfer Pasien dari IGD ke Ruang Rawat Inap	6,000	4,000	10,000	
8.	Pasang kateter lewat Sitostomi	90,000	60,000	150,000	
9.	Injeksi peracunan obat/hari	6,000	4,000	10,000	
F	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN				
I	POLI KLINIK				
1	Format Rekam Medik				

	- Pembuatan Kartu Rekam Medik Untuk Pasien Rawat Jalan	15,000	10,000	25,000	
2	Pelayanan Medik (Poli Klinik)				
	- Dokter Umum/Cigi	21,000	14,000	35,000	
	- Dokter Spesialis (Poliik Spesialis)	40,000	60,000	100,000	
	- pemeriksaan MCU Dokter Spesialis	40,000	60,000	100,000	
3	Pemeriksaan Kesehatan				
	- Keur Kesehatan (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	31,800	21,200	53,000	
	- Keur Kesehatan Haji (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	40,000	60,000	100,000	
	- General Check Up				
	a. Sederhana	320,400	213,600	534,000	
	b. Sedang	949,800	633,200	1,583,000	
	c. Lengkap	1,069,800	713,200	1,783,000	
	d. Lengkap (wanita)	1,249,800	833,200	2,083,000	Di sesuaikan dengan permintaan Perusahaan/ instansi Pemerintah
II	KLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOMOKAN (THT)				
1	Kauistik Faring		30,000	75,000	
2	Ekstraksi benda asing tonsil-faring	60,000	40,000	100,000	
3	Ekstraksi benda asing faring dengan endoskopi	90,000	60,000	150,000	
4	Ekstraksi benda asing mulut	60,000	40,000	100,000	
5	Nasoendoskopi fleksibel				
6	Nasofaringoskopi rigid/fleksibel	90,000	60,000	150,000	
7	Nasoendoskopi rigid/fleksibel				
8	FEES	90,000	60,000	150,000	
9	Ekstraksi corpus hidung				
10	Irigasi hidung	60,000	40,000	100,000	
11	Tampon anterior hidung	60,000	40,000	100,000	
12	Tampon posterior hidung	90,000	60,000	150,000	
13	Kauistik hidung epistaksis	60,000	40,000	100,000	
14	Tes fungsi penghidu	60,000	40,000	100,000	
15	Irigasi sinus	90,000	60,000	150,000	
16	Ekstraksi benda asing telinga	60,000	40,000	100,000	
17	Afhecting	45,000	30,000	75,000	
18	Af tampon	45,000	30,000	75,000	
19	ganti tampon hidung	45,000	30,000	75,000	
20	Ganti verban/drain	45,000	30,000	75,000	
21	Pasang NGT	90,000	60,000	150,000	
22	Pasang NGT dengan endoskopi	120,000	80,000	200,000	
23	Tampon telinga	39,000	26,000	65,000	
24	Mikroskopi telinga tengah	60,000	40,000	100,000	
25	Mikroskopi	60,000	40,000	100,000	
26	Ekstraksi/irigasi serumen	60,000	40,000	100,000	
27	Ekstraksi jaringan granulasi	45,000	30,000	75,000	
28	Ekstasi/kauistik/toilet	15,000	10,000	25,000	
III	KLINIK SYARAF (NEUROLOGI)				
1.	Tes Keseimbangan/Pendengaran	90,000	60,000	150,000	perkali tindakan
2.	Funduscopy	90,000	60,000	150,000	perkali tindakan
3.	Injeksi Lokal (Intra Articular)	60,000	40,000	100,000	perkali tindakan
4.	Injeksi Lokal (C-Arm)	210,000	140,000	350,000	perkali tindakan
5.	Lumbar Punctasi	90,000	60,000	150,000	perkali tindakan

6.	EEG / Brain Mapping	270,000	180,000	450,000	perkali tindakan
7.	Pengirasi Test	96,000	64,000	160,000	perkali tindakan
8.	TCD (Transcranial Doppler)	270,000	180,000	450,000	perkali tindakan
9.	TMS (Trans Magnetic Stimulation)	180,000	120,000	300,000	perkali tindakan
10.	EMG (Electro myografi)	240,000	160,000	400,000	perkali tindakan
11.	EMNG (Electro Myoneurografi)	300,000	200,000	500,000	perkali tindakan
12.	Pemeriksaan Uji Kognitif	120,000	80,000	200,000	perkali tindakan
IV	KLINIK MATA				
1.	Refraksi	60,000	40,000	100,000	
2.	Ganti Verbun (GV)	18,600	12,400	31,000	
3.	Tonometri	24,900	16,600	41,500	
4.	Pundascopy	31,800	21,200	53,000	
5.	Epilasi	24,000	16,000	40,000	
6.	Irigasi	105,000	70,000	175,000	
7.	Excisi	178,200	118,800	297,000	
8.	Incisi	178,200	118,800	297,000	
9.	Ekstraksi Corpus Allenum (Per-nisi)	120,000	80,000	200,000	
10.	Keratometer	30,000	20,000	50,000	
11.	Biometri	30,000	20,000	50,000	
12.	USG Mata	105,000	70,000	175,000	
13.	Tes Buta Warna	30,000	20,000	50,000	
14.	Slide Lamp	30,000	20,000	50,000	
15.	Auto Ref/Tono Ref	60,000	40,000	100,000	
V	KLINIK KULIT KELAMIN / KECANTIKAN				
1.	KULIT KELAMIN				
	- Biopsi ringan & anestesi lokal	180,000	120,000	300,000	
	- Eksisi	210,000	140,000	350,000	
	- Kausterisasi Kondiloma Akuminata	600,000	400,000	1,000,000	
	- Kausterisasi Silita Tag	300,000	200,000	500,000	
	- Kausterisasi Keratosis Seborik	300,000	200,000	500,000	
	- Kerokan Jamur (KOH, Tinta Parker)	450,000	300,000	750,000	
	- Kerokan Parasit (KOH, Tinta Parker)	60,000	40,000	100,000	
	- Debridemen Luka Ringan	60,000	40,000	100,000	
	- Dehidemen Luka Sedang	60,000	40,000	100,000	
	- Injeksi Trilak/besi	60,000	40,000	100,000	
	- Insisi dan Drainage Abses	75,000	50,000	125,000	
	- Insisi dan Drainage Kista	120,000	80,000	200,000	
	- Aft Hecting	150,000	100,000	250,000	
	- Gram (Pewarnaan) IMS	30,000	20,000	50,000	
	- PH Vagina (IMS)	30,000	20,000	50,000	
	- Pewarnaan NaCl	30,000	20,000	50,000	
	- Acetocoalik (tes KA)	33,000	22,000	55,000	
	- Pewarnaan KOH	33,000	22,000	55,000	
	- Wiff Test (IMS)	33,000	22,000	55,000	
	KECANTIKAN				
	- Facial biasa	31,800	21,200	53,000	
	- Facial Jerawat	49,800	33,200	83,000	
	- Facial Pemutih	70,800	47,200	118,000	
	- Facial Pemutih + Galvanik	88,800	59,200	148,000	

	- Chemical Peeling GA 20%,30%	141,600	94,400	236,000	
	- Chemical Peeling Jerawat	141,600	94,400	236,000	
	- Inj. Kenacort	36,000	24,000	60,000	
VI	KLINIK BEDAH/ORTHOPEDI				
1.	Necrotomi/Facialis	60,000	40,000	100,000	
2.	Facialis/Hecting	54,000	36,000	90,000	
3.	Aff Hecting	18,000	12,000	30,000	
4.	Incisi Kecil	60,000	40,000	100,000	
5.	Incisi Abses	108,000	72,000	180,000	
6.	Cross Incisi	63,600	42,400	106,000	
7.	Ganti Verban (GV)	18,600	12,400	31,000	
8.	Dilatasi Vinosia	60,000	40,000	100,000	
9.	Dilatasi antra	60,000	40,000	100,000	
10.	Extractie Corpus alienum	80,400	53,600	134,000	
11.	Extractie Kuku	57,600	38,400	96,000	
12.	Catheterisasi (di luar bahan)	45,000	30,000	75,000	
13.	Aff Catheter	25,200	16,800	42,000	
14.	Spuling Kateter	30,000	20,000	50,000	
15.	Lavament	35,000	24,000	60,000	
16.	Puncti Vesica urinaria	63,600	42,400	106,000	
17.	Reposisi/Fiksasi Verban	64,800	43,200	108,000	
18.	Vena Secti	320,400	213,600	534,000	
19.	Exterpani	177,000	118,000	295,000	
20.	Circummsi	210,000	140,000	350,000	
21.	Pasang + Aff Tampon	96,000	60,000	150,000	
22.	RectaTouche	36,000	24,000	60,000	
23.	Injeksi Intraartikuler	180,000	120,000	300,000	
24.	Pasang Gips	70,800	47,200	118,000	
25.	Buka Gips	90,000	60,000	150,000	
26.	Pasang Spalk	90,000	60,000	150,000	
VII	KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
1.	KB				
	- Pasang IUD (Tanpa Alat)	108,000	72,000	180,000	
	- Aff IUD	144,000	96,000	240,000	
	- Aff IUD dengan Penyulit	216,000	144,000	360,000	
	- Kontrol IUD	36,000	24,000	60,000	
	- Pasang Implan	144,000	96,000	240,000	
	- Aff Implan	252,000	168,000	420,000	
	- Pelayanan Suntik KB dengan Obat	36,000	24,000	60,000	
	- Pelayanan KB (PI + Kondom)	21,600	14,400	36,000	
2.	KIA				
	- Pemeriksaan luar (Kebidanan dan Gynekologi)	72,000	48,000	120,000	
	- Pemeriksaan Khusus (Vaginal Toucher)	43,200	28,800	72,000	
	- Ganti Verban	25,200	16,800	42,000	
	- Aff Hecting / Hecting	21,600	14,400	36,000	
	- Imunisasi Bayi	21,600	14,400	36,000	
	- Pemeriksaan IVA	36,000	24,000	60,000	
	- Koloskopi	360,000	240,000	600,000	
	- Biopsi Cervix / Polip	360,000	240,000	600,000	
					Per Hari

	- Pasang Vesarium	144,000	96,000	240,000	
	- Perawatan dan Sterilisasi (Spool Vesarium)	144,000	96,000	240,000	
	- Pengambilan Sampel Pap smear	60,000	40,000	100,000	
	- Perawatan Luka Erosi Portio	72,000	48,000	120,000	
	- Heacting Tingkat II dan III				
	- Heacting Tingkat III dan IV				
VIII	KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK				
1.	Fisioterapi Anak	27,000	18,000	45,000	
2.	Terapi Okupasi	27,000	18,000	45,000	
3.	Terapi Wicara	27,000	18,000	45,000	
IX	KLINIK GIGI DAN MULUT				
1.	Ringan				
	- Ekstraksi Gigi tetap tanpa komplikasi	120,000	80,000	200,000	
	- Ekstraksi Gigi tetap komplikasi	150,000	100,000	250,000	
	- Ekstraksi Gigi susu tanpa komplikasi	60,000	40,000	100,000	
	- Ekstraksi Gigi susu dengan komplikasi	90,000	60,000	150,000	
	- Tambalan Gigi tetap GI / ART	90,000	60,000	150,000	
	- Tambalan permanen gigi susu	105,000	70,000	175,000	
	- Upperectomy	120,000	80,000	200,000	
	- Insisi Abses	189,000	126,000	315,000	
	- Odontectomy	300,000	200,000	500,000	
	- Odontectomy dengan komplikasi	450,000	300,000	750,000	
	- Alveolectomy	60,000	40,000	100,000	
	- Frenectomy	150,000	100,000	250,000	
	- Trepanasi	60,000	40,000	100,000	
	- Curetage	60,000	40,000	100,000	
	- Ganti Verban	30,000	20,000	50,000	
	- Buka Jahitan	60,000	40,000	100,000	
2.	Sedang				
	- Emulsiase	210,000	140,000	350,000	
	- Ekstraksi Mucocoele Epulis	210,000	140,000	350,000	
	- Partial Dental Protesa	450,000	300,000	750,000	
	- Fiksasi fraktur rahang sederhana	210,000	140,000	350,000	
	- Reprasi protesa :				
	a. Direbus	141,600	94,400	236,000	
	b. Tidak di rebus	99,300	66,200	165,500	
	- Jacket Crown	300,000	200,000	500,000	
	- Light Curing (komposit)	150,000	100,000	250,000	
3.	Tindakan Khusus				
	- Full Dental Protesa	1,938,000	1,292,000	3,230,000	
	- Perawatan Ortodonti alat lepas :				
	a. Ringan	270,600	180,400	451,000	
	b. Sedang	579,600	386,400	966,000	
	c. Berat	840,000	560,000	1,400,000	
	- RA/RO	1,512,000	1,008,000	2,520,000	
	Tindakan Spesialisasi Konservasi Gigi				
1.	Endodontik Anterior	45,000	30,000	75,000	
2.	Pengisian Anterior	45,000	30,000	75,000	
3.	Aleksifikasi	48,000	32,000	80,000	
4.	Endodontik Posterior	54,000	36,000	90,000	

5.	Pengisian Posterior	48,000	32,000	80,000	
6.	Inlay/Onlay	240,000	160,000	400,000	
7.	Pasak Readymade	60,000	40,000	100,000	
8.	Crown Sementara	60,000	40,000	100,000	
9.	Crown	240,000	160,000	400,000	
10.	Labial Veneer Direk	120,000	80,000	200,000	
11.	Labial Veneer Indirek	240,000	160,000	400,000	
12.	Bleaching Interna	90,000	60,000	150,000	
13.	Bleaching Eksterna	900,000	600,000	1,500,000	
14.	sealing RA & RE	270,000	180,000	450,000	
15.	SSP (Sealing Root Planif) Region	90,000	60,000	150,000	
16.	tabuhan sementara + Elemenial	48,000	32,000	80,000	
X	KLINIK PENYAKIT DALAM				
1.	EKG (Elektro Kardiografi)	60,000	40,000	100,000	
2.	Rectal Touche	36,000	24,000	60,000	
3.	Injeksi Intra Artikuler	180,000	120,000	300,000	
4.	transmik test	360,000	240,000	600,000	
XI	KLINIK PARU				
1.	Spirometri	180,000	120,000	300,000	
2.	Injeksi Antibiotik Streptomisin (IM)	28,200	18,800	47,000	
3.	Home Care (Dalam Kota/Luar Kota)	60,000	40,000	100,000	
4.	Proof Punksi	36,000	24,000	60,000	
XII	KLINIK GIZI				
1.	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Gizi	45,000	30,000	75,000	
XIII	RAWAT INAP				
1	bronkoskop	1,920,000	1,280,000	3,200,000	
2	pleurodesis	787,740	525,160	1,312,900	
3	rigtail (Chest tube Inertim)	1,200,000	800,000	2,000,000	
4	cabut selang WSD/rigtail	334,200	222,800	557,000	
5	TTNA (trauthudek medik aksefagus	940,200	626,800	1,567,000	
6	terapi inhalasi	153,000	102,000	255,000	
7	WSD	1,200,000	800,000	2,000,000	
XIV	JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN / MCU				
1.	Format RM				
	- Keur Kesehatan	15,000	10,000	25,000	
	- General Check Up				
	a. Sederhana	15,000	10,000	25,000	
	b. Sedang	15,000	10,000	25,000	
	c. Lengkap	15,000	10,000	25,000	
	d. Lengkap (wanita)	15,000	10,000	25,000	
2.	Adm Keur Kes				
	- Keur Kesehatan	15,000	10,000	25,000	
	- General Check Up				
	a. Sederhana	15,000	10,000	25,000	
	b. Sedang	15,000	10,000	25,000	
	c. Lengkap	15,000	10,000	25,000	
	d. Lengkap (wanita)	15,000	10,000	25,000	
3.	Dokter Umum				
	- Keur Kesehatan	21,000	14,000	35,000	

	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang				
	c. Lengkap				
	d. Lengkap (wanita)				
4.	Darah Lengkap				
	- Darah Rutin + LED	111,000	74,000	185,000	
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana	111,000	74,000	185,000	
	b. Sedang	111,000	74,000	185,000	
	c. Lengkap	111,000	74,000	185,000	
	d. Lengkap (wanita)	111,000	74,000	185,000	
5.	Urine Rutin				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana	37,500	25,000	62,500	
	b. Sedang	37,500	25,000	62,500	
	c. Lengkap	37,500	25,000	62,500	
	d. Lengkap (wanita)	37,500	25,000	62,500	
6.	Glukosa				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	27,000	18,000	45,000	
	c. Lengkap	27,000	18,000	45,000	
	d. Lengkap (wanita)	27,000	18,000	45,000	
7.	Kolestrol				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
8.	LDL				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	33,750	22,500	56,250	
	c. Lengkap	33,750	22,500	56,250	
	d. Lengkap (wanita)	33,750	22,500	56,250	
9.	Triglisida				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	41,250	27,500	68,750	
	c. Lengkap	41,250	27,500	68,750	
	d. Lengkap (wanita)	41,250	27,500	68,750	
10.	HDL				
	- Keur Kesehatan				

	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	33,750	22,500	56,250	
	c. Lengkap	33,750	22,500	56,250	
	d. Lengkap (wanita)	33,750	22,500	56,250	
11.	Asam Urat				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
12.	Ureum				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	31,500	21,000	52,500	
	c. Lengkap	31,500	21,000	52,500	
	d. Lengkap (wanita)	31,500	21,000	52,500	
13.	Creatinin				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	27,000	18,000	45,000	
	c. Lengkap	27,000	18,000	45,000	
	d. Lengkap (wanita)	27,000	18,000	45,000	
14.	SGOT				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
15.	SGPT				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
16.	HbsAg				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	60,000	40,000	100,000	
	c. Lengkap	60,000	40,000	100,000	
	d. Lengkap (wanita)	60,000	40,000	100,000	
17.	HCV				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				

18.	a. Sederhana				
	b. Sedang	120,000	80,000	200,000	
	c. Lengkap	120,000	80,000	200,000	
	d. Lengkap (wanita)	120,000	80,000	200,000	
19.	Thoraks Photo				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana	120,000	80,000	200,000	
	b. Sedang	120,000	80,000	200,000	
	c. Lengkap	120,000	80,000	200,000	
	d. Lengkap (wanita)	120,000	80,000	200,000	
	USG				
20.	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	240,000	160,000	400,000	
	c. Lengkap	240,000	160,000	400,000	
	d. Lengkap (wanita)	240,000	160,000	400,000	
	EKG				
	- Keur Kesehatan				
21.	- General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang	60,000	40,000	100,000	
	c. Lengkap	60,000	40,000	100,000	
22.	d. Lengkap (wanita)	60,000	40,000	100,000	
	Ekspertise Dokter Spesialis Patologi Klinik	15,000	10,000	25,000	
23.	Pem. Dr. Spesialis Interna				
	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana	60,000	40,000	100,000	
	b. Sedang	60,000	40,000	100,000	
	c. Lengkap	60,000	40,000	100,000	
	d. Lengkap (wanita)	60,000	40,000	100,000	
	Pem. Dr. Spesialis Mata				
24.	- Keur Kesehatan				
	- General Check Up				
	a. Sederhana	30,000	20,000	50,000	
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
	Pem. Dr. Spesialis THF				
	25.	- Keur Kesehatan			
- General Check Up					
a. Sederhana		30,000	20,000	50,000	
b. Sedang		30,000	20,000	50,000	
c. Lengkap		30,000	20,000	50,000	
d. Lengkap (wanita)		30,000	20,000	50,000	
Pem. Dr. Spesialis Saraf					
- Keur Kesehatan					
- General Check Up					

26.	a. Sederhana	30,000	20,000	50,000	
	b. Sedang	30,000	20,000	50,000	
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
27.	Pem. Dr. Spesialis Paru - Keur Kesehatan - General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang				
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
28.	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
	Pem. Dr. Spesialis Gigi - Keur Kesehatan - General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang				
29.	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
	Pem. Dr. Spesialis Bedah - Keur Kesehatan - General Check Up				
	a. Sederhana				
30.	b. Sedang				
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
	Pem. Dr. Spesialis Obgyn - Keur Kesehatan - General Check Up				
30.	a. Sederhana				
	b. Sedang				
	c. Lengkap	30,000	20,000	50,000	
	d. Lengkap (wanita)	30,000	20,000	50,000	
30.	PAWSMEAR - Keur Kesehatan - General Check Up				
	a. Sederhana				
	b. Sedang				
	c. Lengkap				
	d. Lengkap (wanita)	180,000	120,000	300,000	
0	TARIF PERAWATAN RAWAT INAP				
1	TARIF PERAWATAN SARANA				
1.	Kelas III	30,000	20,000	50,000	Per Hari
2.	Kelas II	75,000	50,000	125,000	Per Hari
3.	Kelas 1 B (1 Bed)	108,000	72,000	180,000	Per Hari
4.	Kelas 1 A (Ruangan 2 Bed) VIP	150,000	100,000	250,000	Per Hari
5.	Kelas VIP	330,000	220,000	550,000	Per Hari
6.	Perawatan dengan incubator	210,000	140,000	350,000	Per Hari
7.	Perawatan RR/Intermediate	180,000	120,000	300,000	Per Hari
8.	Perawatan ICU/ICCU/Isolasi Covid	240,000	160,000	400,000	Per Hari
9.	Perawatan NICU/ISCU	240,000	160,000	400,000	Per Hari
10.	Pemakaian Kamar Operasi	180,000	120,000	300,000	Per Hari

II	TARIF PELAYANAN VISITE SPESIALIS RAWAT INAP				
1.	Kelas III	21,000	14,000	35,000	Per Hari
2.	Kelas II	30,000	20,000	50,000	Per hari
3.	Kelas IA dan IB	45,000	30,000	75,000	Per Hari
4.	Kelas VIP	60,000	40,000	100,000	Per Hari
5.	Perawatan dengan Incubator	60,000	40,000	100,000	Per Hari
6.	Perawatan RR/Intermediate	60,000	40,000	100,000	Per Hari
7.	Perawatan ICU/ICCU/Isolasi Covid	60,000	40,000	100,000	Per Hari
8.	Perawatan NICU/PICU	60,000	40,000	100,000	Per Hari
III	KONSUL DOKTER AHLI/KONSUL ANTAR SMP				
1.	Kelas III	21,000	14,000	35,000	
2.	Kelas II	30,000	20,000	50,000	
3.	Kelas IA dan B	45,000	30,000	75,000	
4.	Kelas VIP	60,000	40,000	100,000	
5.	ICU/ICCU dan INTERMEDIATE/ Isolasi covid	60,000	40,000	100,000	
IV	KONSUL / PEMERIKSAAN KHUSUS JIWA				
1.	Sederhana	30,000	20,000	50,000	1. Psikoterapi Suportif 2. Konseling Keluarga 3. Konseling Perkawinan 4. Konseling Anak dan Remaja
2.	Sedang	45,000	30,000	75,000	1. Family Therapy 2. Group Therapy 3. Therapy Modifikasi Perilaku 4. Psikoterapi Individual (Brief Therapy/Client Center Therapy) 5. Konseling KIDRT 6. Konseling MAPSA
3.	Besar	300,000	200,000	500,000	1. CBT 2. MET 3. Psikoterapi Individual (Dynamic Individual Therapy) 4. Pemeriksaan test psikiater / psikologi - test MMPS - test TKMI
V	TARIF PELAYANAN GIZI RAWAT INAP				
1.	Makanan Diet				Per hari
	-Diet Rendah Garam	29,400	19,600	49,000	Per hari
	-Diet DM	25,200	16,800	42,000	Per hari
	-Diet Jantung	29,400	19,600	49,000	Per hari
	-Diet Rendah Protein	25,200	16,800	42,000	Per hari
	-Diet Lemak	36,000	24,000	60,000	Per hari
	-Diet Rendah Purin	29,400	19,600	49,000	Per hari
	-Diet Cair DM	25,200	16,800	42,000	Per hari
	-Diet Cair Non DM	34,440	22,960	57,400	Per hari
	-Diet Rendah Lemak	29,400	19,600	49,000	Per hari
	-Diet TKTP	46,200	30,800	77,000	Per hari
	-Diet hemodialisa	29,400	19,600	49,000	per hari

	-Pelayanan Pasien	3,000	2,000	5,000	Per hari
	-Diet hari	29,400	19,600	49,000	Per hari
2.	-Makan Biosa				
	-VIP	54,600	36,400	91,000	
	-Kelas I, II, ICU/ICCU dan Perinatologi	42,600	28,400	71,000	
	-Kelas III	33,600	22,400	56,000	
3.	-Anuhan / Konsultasi Gizi				
	-VIP, ICCU dan ICU	30,000	20,000	50,000	
	-Kelas I, II, III dan Perinatologi	21,000	14,000	35,000	
	Assesment Gizi	21,000	14,000	35,000	Per hari
4.	Screening Gizi lanjut	12,000	8,000	20,000	
H	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK				
I	TINDAKAN OPERATIF				
1.	Operasi Kecil	1,224,000	816,000	2,040,000	
	-Obgyn				1.Induksi Haid 2.Hecting situasi tanpa Narrose 3.Douglas Pungsi 4.Pemasangan Cicin pada Prolapsus Uteri 1.Wide Excisi Tumor Ø = 2 cm 2.Pungsi Acites di Ruang Perawatan
	-Onkologi				
	-Toras - Faskuler				
	-Digestif				
	-Urology				-Dilatasi Phymosis -Sirkumisasi
	-Orthopedi				
	-Plastik				
	-Lain - Lain				
2.	Operasi Sedang	4,392,000	2,928,000	7,320,000	
	-Obgyn				1. DFUP 2.Embriotomi 3.Translokasi IUD 4.Hecting Situasi dengan Narrose 5.Kuretase + Anastasi 6.Laparoscopi 7.Tumor Jinak pada : - Serviks - Vagina - Vulva 8. Hecting Ruptur Perimetrium Tingkat IV 8.Eksterpsi Pulip 9.Ekstraksi IUD dengan Penyulit 1.Wide Excisi Tumor Ø ≥ 2 cm - 5 cm 2.Wide Excisi Tumor Ø > 2 cm 3.Incisi Biopsi Tumor 4.Pungsi Acites di Ruang OK 1.Tube Toracostomy / Pasang WSD 2.Vena Sesectie 1.Appendectomy (Tanpa Penyulit) 2.Herniorraphy (Operasi Hernia) tanpa Penyulit 1.Meotomy
	-Onkologi				
	-Toras - Faskuler				
	-Digestif				
	-Urology				

3.	<p>-Orthopedi</p> <p>-Plastik</p> <p>-Lain - Lain</p> <p>Operasi Besar</p> <p>-Obgyn</p> <p>-Onkologi</p> <p>-Torus - Fasciolar</p> <p>-Digestif</p> <p>-Urology</p>	7,812,000	5,208,000	13,020,000	<p>2.Dilatasi Phymosis</p> <p>3.Sirkumsisi</p> <p>4.Pemasangan Karakter dengan Penyulit</p> <p>1.Angkat K-Wire (All K-Wire) dengan Hecting</p> <p>2.Reposisi / Bedukai Fraktur Tertutup + Fiksasi Eksterna dengan Gips</p> <p>3.Debridement Necrotic Tissue</p> <p>4.Debridement Diabetic Foot</p> <p>1.Operasi Tumor Jinak / Kista</p> <p>2.Sectio Cesaria (SC)</p> <p>3.KET</p> <p>4.Miomektomi</p> <p>1.Wide Excisi Tumor Ø > 5 cm</p> <p>2.Simple Mastectomy</p> <p>3.Modified Radical Mastectomy</p> <p>4.Lobectomy Thyroid</p> <p>5.Isthmo - Lobectomy Thyroid</p> <p>6.Excisi Ganglion Poplitea (Baker's Cyst)</p> <p>7.Excisi Kista Ductus Thyroglossus</p> <p>- Wide Excisi Tumor pada Wajah/Leher</p> <p>Lipat Sendi</p> <p>1.Ligasi - Excisi / Stripping Varicos</p> <p>2.Wide Excisi Hemangtoma Ø > 2 cm</p> <p>1.Appenlectomy pada anak tanpa Penyulit</p> <p>2.Appenlectomy dengan Penyulit (Perforasi / Perlejangatan Appendix yang berat)</p> <p>3.Mini - Laparotomy + Appenlectomy</p> <p>4.Laparotomy Ekplorasi / Proof Laparotomy</p> <p>5.Laparotomy pada Trauma Abdomen</p> <p>6.Laparotomy + Insisi - Drainage</p> <p>Abscess Hepar</p> <p>7.Repair Perforasi Gaster</p> <p>8.Repair perforasi Usus</p> <p>9.Herniectomy (Operasi Hernia) pada Anak tanpa Penyulit</p> <p>10.Herniorraphy (Operasi Hernia) dengan Penyulit (Inkarserasi/Strangulata/Akr eta)</p> <p>11.Combined Herniorraphy (Operasi Hernia + Pemasangan Mesh)</p> <p>12.Colostomy / Ileostomy</p> <p>13.Anoplasty Sederhana (Cut Back)</p> <p>14.Hemorrhoidectomy</p> <p>15.Fistulectomy Perianal</p> <p>1.Open Prostatotomy Transvesicalis</p> <p>2.Open Prostatotomy Retropubic</p>
----	--	-----------	-----------	------------	---

					<ul style="list-style-type: none"> 3.Vesicothotomy/Sectio Alta 4.Open Cystostomy (Sistomi Terbuka) 5.Varicocelectomy 6.Hydrocelectomy Per Scrotal 7.Orchidectomy Subcapsular 8.Ectasi Chondar/Chondrectomy Hipospadia 9.Repair / Rekonstruksi Hipospadia Subcrotasi 1.Amputasi Jari Tangan/Kaki Single/ Multiple 2.Angkat (off) Plate /Pen - Screw (-Remove Implants) 3.Debridement Fraktur Terbuka (Open Fracture) 4.Disartikulasi Sendi Jari Tangan / Kaki Single / Multiple 5.Drif Fraktur Tertutup (Closed Fracture) (Humerus/Radius/Ulna/Femur /Tibia/Fibula) - Release Compartment Syndrome (Fasciotomy) - Debridement Osteomyelitis - Release Kontraktur Jari/Digiti Tangan/ Kaki - Koreksi CTEV - Amputasi Ekstremitas (Above Elbow/ Below Elbow/Above Knee/Below Knee) 1. Eksisi Tumor soft tissue 2. Debrideman scalp 3. Debrideman jaringan lunak regio leher dan Punggung 1.Debridement Luka Bakar (Combustio) 1.Incisi / Drainage Abscess pada daerah Kepala Leher
4	<ul style="list-style-type: none"> -Orthopedi Bedah saraf (Op. Besar) -Plastik -Lain - lain Operasi Khusus -Obgyn -Onkologi 	11,736,000	7,824,000	19,560,000	<ul style="list-style-type: none"> 1.Histerektomi 2.Operasi Tumor Ganas Ovarium/Uterus 3.Reparasi Fistula - Rektovaginalis - Vesikouterina - Vesikovaginalis 4.Reparasi Vagina 5.Reparasi Tuba - Ginjal - Laparis - TVR-P 1.Total Thyroidectomy 2.Subtotal Thyroidectomy

	<p>-Tumor - Faskuler</p> <p>-Digeitif</p>				<p>3.Parotidectomy</p> <p>1.Wide Excisi Hemangioma Ø > 2 cm</p> <p>1.Appendectomy dengan Penyulit pada Anak (Perforasi/Perlengkapan Appendix yang berat)</p> <p>2.Laparotomy + Mikting/Reseksi</p> <p>3.Invaginal</p> <p>4.Splenectomy</p> <p>5.Cholecystectomy</p> <p>6.Reseksi + Anastomosis Usus</p> <p>7.Herniotomy (Operasi Hernia) pada Anak dengan Penyulit (Inkarsetata/Strangulata/Akreta)</p> <p>8.Colostomy/Ileostomy pada Anak</p> <p>9.Segmentectomy Usus</p> <p>10.Hemicolectomy Usus</p> <p>11.Operasi Hernia Umbilicialis + Repair Defek</p> <p>12.Herniorraphy/Herniotomy Bilatera)</p> <p>13.Reseksi Hepar</p> <p>1.Hydrocelectomy Per Inguinal (Jigasi Tinggi)</p> <p>2.Repair/Rekonstruksi Buli-buli Trauma/Defek Dinding Buli-buli/Difertile)</p> <p>3.Partial Nefrectomy</p> <p>4.Repair/Rekonstruksi Hipospadia + Urethroplasty</p> <p>5.Railroading Ruptur Urethra (Kaus Ruptur Urethra Posterior)</p> <p>1.Repair Ruptur Tendon Jari Tangan/Kaki Single/Multiple</p> <p>2.Release Kontraktur Sendi Besar (Remak/Siku/Tangan/Paha/Lutut/Kaki)</p> <p>3.Disartikulasi Sendi Besar (Elbow/Hand Knee/Ankle)</p> <p>4.Arthroplasty</p> <p>5.Debridement/Hip Joint</p> <p>6.Reduksi Dislokasi Lama</p> <p>1.Debridement dengan Flap Kulit</p> <p>2.Debridement dengan Skin Grafting</p> <p>3.Excisi Tumor dengan Skin Grafting/Flap</p> <p>4.Latissimus Dorsi Flap/LD Flap</p> <p>5.Labioplasty</p> <p>6.Rekonstruksi Defek Tubuh dengan Skin Grafting/Flap</p> <p>7.Reposisi/Reduksi Fraktur + Fiksasi Interna (Orif Fraktur Mandibula)</p> <p>8.Repair Platel Vesicocutaneus</p>
	<p>-Urology</p>				
	<p>-Orthopedi</p>				
	<p>-Plastik</p>				

	Bedah syaraf (Op. Khusus)				<ul style="list-style-type: none"> 9.Repair Flap/ Interocutaneous 1. Vp abutt 2. Exteral Ventricular drainage 3. Burrhole drainage 4. Burr hole aspirasi 5. Kraniotomi evakuasi 6. kraniektomi dekompresi 7. Kraniektomi tumor tengkorak 8. Kraniotomi/kraniektomi 9. Evakuasi perdarahan epidural/subdural 10.Evakuasi abses epidural/subdural 11.Debrideman osteomyelitis 12.Reduksi/Elevasi fraktur tengkorak 13. Insertion skull plate 14. Flap/rekonstruksi scalp 15. Flap/rekonstruksi jaringan lunak spinal 16. Kranioplasty 17. Tracheostomy 1.Craniotomy/Trepanasi Konvensional 2.Eksplorasi Corpus Allentum
5.	<p>-Lain - Lain</p> <p>Operasi Canggih</p> <p>Bedah Syaraf (Op. Canggih)</p>	12,420,000	8,280,000	20,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laminektomi 2. Anterior cervical disectomy and fusion (ACDF) 3. Kraniotomi ekais tumor intrakranial 4. Rekonstruksi kraniofasial 5. Ekais tumor Intracerebral 6. Ekais abses Intracerebral 7. Evakuasi intracerebral hematoma 8. Debrideman spinal 9. Stabilisasi/fusi spinal
6.	Observasi Pasien di Ruang RR 2 s/d 5 Jam	43,200	28,800	72,000	
7.	Kamar Operasi	216,000	144,000	360,000	
II	TINDAKAN OPERATIF MATA DAN THT				
1.	THT (Telinga,bidung,Tenggorokan)				
	-Ringan	1,020,000	680,000	1,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 1.Ekstraksi Jaringan Granulasi Liang Telinga 2.Insisi pada efusi perikondrial dengan Pemasangan Gips
	-Sedang	3,660,000	2,440,000	6,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 1.Insisi Abses Peritonsil 2.Insisi Abses Septum Nasi 3.Insisi Abses Mastoid 4.Pungsi dan Irigasi Sinus Maksilaris 5.Ekstraksi Polip Hidung 6.Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga 7.Insisi Abses Sputum 8.Insisi Abses Mastoid 9.Insisi pada retrofaringeal 10.Ektipasi Kista ateroma didaun telinga

2.	- Besar	6.510,000	4.340,000	10,850,000	<ul style="list-style-type: none"> 11. Esofagoskopi (untuk diagnosis / terapi) 12. Pemasangan tampon posterior pada epitaksis 13. Laryngoscopic direk / indirek 1. Tonidilektomi dan Tonsilo - Adenoiddektomi 2. Bronakopi (untuk diagnosis/terapi) Trakeostomi/Retrakeostomi Eksplosi Nasofaring 3. SMR 4. CI 5. Mastioidektomi 6. Reposisi Hidung 7. Rhinotomy Lateral
	Mata -Kecil	1,020,000	680,000	1,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Korpus Alienum Ekstra Okuler 2. Granuloma 3. Jahitan Luka Palpebra 4. Klaxion 5. Hordiolium 6. Pangkula 7. Biopsi 8. Tatouase 9. Eksisi tumor palpebra 10. Eksisi hordeolum/kalazion 11. Eksisi granuloma konjungtiva 12. Heacting konjungtiva 13. Heacting palpebra 14. Alf Heacting
	-Sedang	3,660,000	2,440,000	6,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pensektasi 2. Plep Konjungtiva 3. Pteregium 4. Parsial Permanen 5. Rekonstruksi Palpebra 6. Intravitreal 7. Eksisi pterigium 8. Yag capsulotomy 9. Graft / flap konjungtiva 10. Debridement luka mata 11. Rekonstruksi palpebra 12. Iridotomi (yag laser)
	-Besar	6.510,000	4.340,000	10,850,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Katarak 2. Trabekulektomi 3. Korpus Alienum Intra Okuler 4. Emulensi dan Eksentrisi 5. Ptoais 6. Entropion 7. Ekotropion 8. Eviserasi 9. Iridektomi Perifer

					10. Tumor Konjungtiva 11. Hecaring kornea 12. Eviserasi/enukleasi bulbi 13. Reposisi iris 14. Sinar-isi 15. Glaukoma triple prosedur 16. Vitrektomi anterior 17. Implantasi IOL sekunder 18. Iridektomi 19. Ekplantasi IOL 20. Irigasi/Aspirasi sisa korteka 21. Irigasi/Aspirasi hyfema/hyopion 22. Repair Ruptur okuli (multiple prosedur)
	-Khusus	9,780,000	6,520,000	16,300,000	1. Strabismus
	-Canggih	10,350,000	6,900,000	17,250,000	2. Ablasi Retina 3. Lock Photocoagula 1. Operasi Katarak dgn Metode Phacoemulsifikasi 2. Vitrektomi
III	TINDAKAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL				
1.	Bedah TMJ (Gap Arthroplasty, Kondilectomy, Kondilotomi, dan Interposition Arthroplasty)	4,934,400	3,289,600	8,224,000	
2.	Goniorplasty dengan bone graft, mucosal graft atau skin graft mucosal graft atau skin graft	4,226,700	2,817,800	7,044,500	
3.	Bedah Orthognatik	6,138,000	4,092,000	10,230,000	
4.	Osteodistraksi, Maksila/Mandibula	4,830,000	3,220,000	8,050,000	
5.	Rekonstruksi Fasial Cleft	4,935,000	3,290,000	8,225,000	
6.	Velopharyngeal Flap/Velosphe	4,935,000	3,290,000	8,225,000	
7.	Rekonstruksi dengan Abbe Flap	4,226,400	2,817,600	7,044,000	
8.	Implant Dental	7,200,000	4,800,000	12,000,000	
IV	TINDAKAN PERSALINAN				
1.	Persalinan Normal	792,000	528,000	1,320,000	1. Persalinan Normal tanpa insus dengan jumlah HC 1 - 2
2.	Persalinan dengan Penyulit Ringan	980,640	653,760	1,634,400	1. Persalinan Prematur 2. Persalinan Gemeli 3. Persalinan Imaturus 4. Manual
3.	Persalinan dengan Penyulit Sedang	1,008,000	672,000	1,680,000	1. Vacuum Ekstraksi 2. Persalinan Letak Puncak Kepala 3. Persalinan Letak Muka 4. Persalinan dengan Ekstraksi Bahu Sulkar 5. Persalinan Bokong
4.	USG Transvaginal	262,000	168,000	420,000	
5.	Ekstraksi IUD Non Anestesi	216,000	144,000	360,000	
6.	Manual Placenta	288,000	192,000	480,000	
7.	Pasang Tampon	54,000	36,000	90,000	
8.	Aff Tampon	32,400	21,600	54,000	

9.	Reacting Perineum Tingkat II dan III	210,000	140,000	350,000	
10.	Dopler	150,000	100,000	250,000	Per hari
11.	KBE	90,000	60,000	150,000	
12.	KBI	150,000	100,000	250,000	
13.	Kondom Kateter Wanita	150,000	100,000	250,000	
14.	pemasangan lamina	90,000	60,000	150,000	
15.	inspeksi	90,000	60,000	150,000	
V	TINDAKAN UNIT KHUSUS				
1.	Tindakan Hemodialisa (Cuci Darah)				
	-Hemodialisa non Re-Use	540,000	360,000	900,000	tidak termasuk DRP medic
	-Hemodialisa Re-Use	660,000	440,000	1,100,000	
	-Tindakan Re-use	15,000	10,000	25,000	
	-Perawatan CDR	90,000	60,000	150,000	
	-Penggantian Transfer set	180,000	120,000	300,000	
2.	Tindakan Penyulit Khusus Bayi				
	-Pasang infus	85,200	56,800	142,000	
	-Pasang sonde	74,400	49,600	124,000	
	-Vena Sekai	210,000	140,000	350,000	
	-Perawatan Tali Pusat	18,000	12,000	30,000	
	-Resusitasi	120,000	80,000	200,000	
	-Foto Therapy	30,000	20,000	50,000	Per-Shift
	-pemberian minum bayi	12,000	8,000	20,000	
	-oral test	12,000	8,000	20,000	
	-pemberian obat oral	6,000	4,000	10,000	
	-Aff OGT	6,000	4,000	10,000	
	-Aff oksigen	6,000	4,000	10,000	
	-Timbang berat badan	6,000	4,000	10,000	Per Hari
	-Cek residu	12,000	8,000	20,000	
	-metode kanguru ? PMK	90,000	60,000	150,000	
	-pasang neupap	180,000	120,000	300,000	
3.	Perawatan RP / Intermediate				
	-Tropokinase / Streptase	312,000	208,000	520,000	
	-Defibrilasi / DC Shock	150,000	100,000	250,000	
	-Resusitasi	210,000	140,000	350,000	
	-Penyuntikan di Area Umbilikalis	45,000	30,000	75,000	
	-Pemasangan kawat Dekubitus	60,000	40,000	100,000	
	-Pemakaian Patient Monitor	57,000	38,000	95,000	
	-Epidural	900,000	600,000	1,500,000	
4.	Perawatan Khusus ICU (Intensive Care Unit)				
	-Ventilator	900,000	600,000	1,500,000	
	-Defibrilasi/DC Shock	150,000	100,000	250,000	Per-Kali
	-Resusitasi	210,000	140,000	350,000	Per-Kali
	-Kumbah Lambung	120,000	80,000	200,000	Per-Kali
	-Pemasangan CVP untuk	600,000	400,000	1,000,000	
	-nutrisi parental				
	-Pemakaian Patient Monitor	57,000	38,000	95,000	
	-Intubasi	450,000	300,000	750,000	
	Aff ETT (ekstubasi)	15,000	10,000	25,000	

	Nebulizer	70,800	47,200	118,000	
	Sonde/pemberian nutrisi via selang NGT	54,000	36,000	90,000	
	observasi di ruangan ICU/ICCU /Perinatologi	12,000	8,000	20,000	per hari
1	TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN RAWAT				
1	TINDAKAN KEPERAWATAN				
1.	Pemberian Obat :				
	a. Suppositoria	12,000	8,000	20,000	Per Kali
	b. Topikal	12,000	8,000	20,000	Per Kali
	c. Syringe Pump	24,000	16,000	40,000	Per Hari
	d. Infus Pump	24,000	16,000	40,000	Per Hari
2.	Pasang NGT / OGT	76,200	50,800	127,000	
3.	Pemasangan Transfusi Darah	6,000	4,000	10,000	
4.	Pasang Infus Pada Pasien Dewasa	24,000	16,000	40,000	Per 3 Hari
5.	Pasang infus pada Bayi / Anak	36,000	24,000	60,000	Per 3 Hari
6.	Pasang Kateter Tanpa penyulit	33,000	22,000	55,000	Per 5 Hari
7.	Pasang Kateter Dengan Penyulit	90,000	60,000	150,000	Per 5 Hari
8.	Resistansi	36,000	24,000	60,000	
9.	All Tampon	32,400	21,600	54,000	
10.	All Drain	21,300	14,200	35,500	
11.	Perawatan WSD	18,000	12,000	30,000	Per Hari
12.	Suction	12,000	8,000	20,000	Per Hari
13.	Suction via Alat	21,000	14,000	35,000	Per Hari
14.	Pasang Laminaria	15,000	10,000	25,000	
15.	Spuling Kateter	15,000	10,000	25,000	
16.	Kлизма / Helena	30,000	20,000	50,000	
17.	Perawatan Payudara (Breast Care)	60,000	40,000	100,000	
18.	Memandikan Pasien	12,000	8,000	20,000	Per Hari
19.	Perawatan Luka				Per Hari
	a. Luka Bakar/Kotor				
	- Kecil	24,900	16,600	41,500	
	- Sedang	39,000	26,000	65,000	
	- Besar	60,300	40,200	100,500	
	b. Luka Bersih				
	- Kecil	18,000	12,000	30,000	
	- Sedang	24,900	16,600	41,500	
	- Besar	32,100	21,400	53,500	
	c. Luka Khusus				
	- Ganggren	60,300	40,200	100,500	
	- Ulkus diabetik	60,300	40,200	100,500	
	- Carcinoma	60,300	40,200	100,500	
	- Decubitis	60,300	40,200	100,500	
20.	Perawatan Infus	6,000	4,000	10,000	Per Hari
21.	Perawatan Kateter	9,000	6,000	15,000	Per Hari
22.	Vulva Hygiene	18,000	12,000	30,000	
23.	Vagina Toilet	30,000	20,000	50,000	
24.	Observasi D/F	6,000	4,000	10,000	
26.	All ETT (elastubesi)	15,000	10,000	25,000	
27.	Nebulizer	70,800	47,200	118,000	
28.	Injeksi periancam obat/Hari	6,000	4,000	10,000	

II	TINDAKAN KEPERAWATAN LUKA BAKAR				
1.	Ringan	900,000	600,000	1,500,000	-Luka Bakar derajat I seluas < 15% atau derajat < 2%
2.	Sedang	3,660,000	2,440,000	6,100,000	-Luka Bakar derajat II - 15% atau derajat II seluas 5 - 10%
3.	Besar	6,510,000	4,340,000	10,850,000	-Luka Bakar derajat II seluas > 20% atau derajat III seluas > 10% atau mengenai wajah, tangan - kaki, alat kelamin/ persendian sekitar ketiak atau akibet listrik tegangan tinggi (> 1000 V) atau dengan komplikasi patah tulang / kerusakan jaringan lunak / gangguan jalan nafas
III	ELEKTROMEDIK				
1.	Sederhana	60,000	40,000	100,000	1. Elektrokardiografi (EKG)
2.	Sedang	80,100	53,400	133,500	1. EKG Monitor
3.	Besar	210,000	140,000	350,000	1. Echo Dopler 2 DIM 2. USG Kandungan dengan Echo Dopler
4.	Canggih	330,000	220,000	550,000	1. Treadmill 2. Pace Maker
IV	ENDOSCOPY				
1.	EGD (Esafago Gastro Duodenoskopi)	534,100	349,400	873,500	
2.	Kolonoskopi	683,400	455,600	1,139,000	
3.	ST Haemoroid	329,400	219,600	549,000	
4.	Ligasi	991,200	660,800	1,652,000	
5.	Stc Ve	900,000	600,000	1,500,000	
V	RADIODIAGNOSTIK				
1.	Sederhana (Per expose)	120,000	80,000	200,000	1. Bone Surevry termasuk - Extremitas Atas - Extremitas Bawah 2. Thorax Foto 3. Extremitas atas - Humerus - Antebrachj - Manua 4. Extremitas Bawah - Femur - Cruris - Pedis
2.	Sedang (Per expose)	126,000	84,000	210,000	1. Atteresiensi 2. Servical Syndrom 3. BNO 3 Posisi 4. Kepala - Sinus - Mandibula 5. BNO (Pelus/Abdomen) 6. Columna Verteblaris - Cervical

					- Thoracal - Lumbal - Sacral - Coccyx
3.	Besar (Per Pemeriksaan)	540,000	360,000	900,000	7. Pelvis 1. Oesophagus 2. Follow Through 3. Maag Doudenom 4. Cor Analisa 5. BNO / IVP 6. Urethrogram/Cystografi 7. Colon In Loop 8. Fistulography 9. Histero Salpingo Graf (HSG) 10. Myelografi 11. Cholecystografi 12. Phlebografi 13. Arteriografi 14. Bronchografi
4.	Ultrasonografi (USG)	240,000	160,000	400,000	
5.	Dental	150,000	100,000	250,000	
6.	MRI	900,000	600,000	1,500,000	
7.	Patentasi	360,000	240,000	600,000	
VI	CT-SCAN				
1.	CT Scan Non Kontras				
	- Kepala	600,000	400,000	1,000,000	
	- SPN Cor/Aksial	600,000	400,000	1,000,000	
	- Mastoid/Aksial	600,000	400,000	1,000,000	
	- Thorax	690,000	460,000	1,150,000	
	- Abdomen Atas	690,000	460,000	1,150,000	
	- Abdomen Bawah	690,000	460,000	1,150,000	
	- Femur / Kaki	600,000	400,000	1,000,000	
	- Lumbal	690,000	460,000	1,150,000	
	- Servikal	600,000	400,000	1,000,000	
	- Cubiti/Ankle	600,000	400,000	1,000,000	
	- Nasofaring	690,000	460,000	1,150,000	
	- Maksila Cor/Aksial	600,000	400,000	1,000,000	
	- Orbita	690,000	460,000	1,150,000	
2.	CT Scan Dengan Kontras				
	- Kepala	900,000	600,000	1,500,000	
	- SPN Cor/Aksial	900,000	600,000	1,500,000	
	- Mastoid/Aksial	900,000	600,000	1,500,000	
	- Thorax	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Abdomen Atas	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Abdomen Bawah	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Femur/Kaki	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Lumbal	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Servikal	1,050,000	700,000	1,750,000	
	- Cubiti/Ankle	778,800	519,200	1,298,000	

	- Nasofaring	885,000	590,000	1,475,000	
	- Maksilla Cor/Aksial	900,000	600,000	1,500,000	
	- Orbita	885,000	590,000	1,475,000	
3.	CT Scan Cerebral	1,050,000	700,000	1,750,000	
4.	CT Scan Angiography	1,050,000	700,000	1,750,000	
5.	USG Mamman	330,000	220,000	550,000	
6.	USG Abdomen	210,000	140,000	350,000	
7.	USG Thyroid	240,000	160,000	400,000	
8.	Virtual Colonoscopy	210,000	140,000	350,000	
9.	Mammography + USG	600,000	400,000	1,000,000	
10.	HSG	600,000	400,000	1,000,000	
11.	USG Doppler	450,000	300,000	750,000	
VII	PATOLOGO ANATOMI				
1.	Histopatologi (Bedah)				
	- Jaringan Kecil (<2 cm)	270,000	180,000	450,000	
	- Jaringan Sedang (2 - 5 cm)	330,000	220,000	550,000	
	- Jaringan Besar (>5 cm)	540,000	360,000	900,000	
	- Biopsi Khusus (Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)				
	a. Biopsi 1-2 Jaringan	270,000	180,000	450,000	
	b. Biopsi 3-4 Jaringan	396,000	264,000	660,000	
	c. Biopsi lebih dari 4 Jaringan	480,000	320,000	800,000	
	- VC/Frozen Section	540,000	360,000	900,000	
2.	Sitopatologi (Laboratorium/Bedah)				
	- Slide PAP Smear	99,000	66,000	165,000	
	- Sitologi Cairan Efusi, Asepsis, Sputum, Urin	270,000	180,000	450,000	
	- FNAB Superfisial	330,000	220,000	550,000	
	- FNAB Deep (Guidance)	450,000	300,000	750,000	
VIII	BANK DARAH RUMAH SAKIT				
1.	1 (Satu) Kantong Darah	216,000	144,000	360,000	
2.	Golongan Darah	12,000	8,000	20,000	
3.	Diagnosa Koncling Pendonor dan Cek HB	12,000	8,000	20,000	
4.	Pemeriksaan Frisk Donor	12,000	8,000	20,000	
5.	Pelayanan Alap	12,000	8,000	20,000	
6.	Uji Saring 4 penyakit (HBsAg, HVC, SIDA, HIV)	12,000	8,000	20,000	
7.	Cross Matching (Pencocokan Darah dengan Kantong Darah)	15,000	10,000	25,000	
IX	PATOLOGI KLINIK				
1.	Hematologi				
	- Laju Endap Darah	18,000	12,000	30,000	
	- Darah Rutin (SDIPF)	75,000	50,000	125,000	
	- Darah Rutin (SDHPF)	93,000	62,000	155,000	
	- Masa Pembekuan (CT)	15,000	10,000	25,000	
	- Masa Perdarahan (DT)	15,000	10,000	25,000	
	- Retikulosit	16,500	11,000	27,500	
	- FE/SI (Serum Iron)	56,250	37,500	93,750	
	- TIBC	56,250	37,500	93,750	
	- Feritin	112,500	75,000	187,500	
	- Prothrombine Time (PT)	112,500	75,000	187,500	

2.	- Morfologi Darah Tepi	60,000	40,000	100,000	
	- Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	112,500	75,000	187,500	
	Kimia Darah				
	- Glukosa				
	- Glukosa Darah Puasa (GDP)	27,000	18,000	45,000	
	- Glukosa Darah 2 Jam Post Prandial (GD2PP)	27,000	18,000	45,000	
	- Glukosa Darah Sewaktu (GDS)	27,000	18,000	45,000	
	- Glukosa Toleransi Test (GTT)	45,000	30,000	75,000	
	- Ureum	31,500	21,000	52,500	
	- Kreatinin	27,000	18,000	45,000	
	- SGOT	30,000	20,000	50,000	
	- SGPT	30,000	20,000	50,000	
	- Protein Total	31,500	21,000	52,500	
	- Albumin	31,500	21,000	52,500	
	- Globulin	31,500	21,000	52,500	
	- Bilirubin Total	31,500	21,000	52,500	
	- Bilirubin Direk	31,500	21,000	52,500	
	- Bilirubin Indirek	31,500	21,000	52,500	
	- Fosfatase Alkali	33,750	22,500	56,250	
	- Gamma GT	37,500	25,000	62,500	
	- Kolesterol Total	30,000	20,000	50,000	
	- Kolesterol LDL	33,750	22,500	56,250	
	- Kolesterol HDL	33,750	22,500	56,250	
	- Trigliserida	41,250	27,500	68,750	
	- Asam Urat	30,000	20,000	50,000	
	- CK	71,250	47,500	118,750	
	- CK-MB	112,500	75,000	187,500	
- HbA1C	135,000	90,000	225,000		
- Troponin	117,750	78,500	196,250		
- Myoglobin	117,750	78,500	196,250		
3. Elektrolit (Paket)	112,500	75,000	187,500		
4. Analisis Gas Darah					
- Basah	187,500	125,000	312,500		
- Kering	177,000	118,000	295,000		
5. Imunologi					
- Dengue Blot IgG	90,000	60,000	150,000		
- Dengue Blot IgM	90,000	60,000	150,000		
- Dengue NS I Antigen	150,000	100,000	250,000		
- Malaria Rapid Test	75,000	50,000	125,000		
- Malaria Mikroskopis	16,800	11,200	28,000		
- IgM Anti Salmonella	120,000	80,000	200,000		
- Anti TB IGG/IGM	210,000	140,000	350,000		
- Test Kehamilan	22,500	15,000	37,500		
- VDRL	37,500	25,000	62,500		
- WIDAL	41,250	27,500	68,750		
- ASTO	37,800	25,200	63,000		
- RF (Factor Rheumatoid)	37,800	25,200	63,000		
- CRP Kualitatif	37,800	25,200	63,000		
- HBs Ag (Kualitatif)	60,000	40,000	100,000		

	- HBs Ag (Kuantitatif)	90,000	60,000	150,000	
	- Anti Hbs (Kualitatif)	75,000	50,000	125,000	
	- Anti Hbs (Kuantitatif)	90,000	60,000	150,000	
	- Anti HbsAg	126,000	84,000	210,000	
	- Anti HCV	120,000	80,000	200,000	
	- Anti HIV	112,500	75,000	187,500	
	- PT -3	94,200	62,800	157,000	
	- PT -4	150,000	100,000	250,000	
	- TBHs	150,000	100,000	250,000	
	- T-3 (TOTAL)	94,200	62,800	157,000	
	- T-4 (TOTAL)	94,200	62,800	157,000	
	- CD-4	150,000	100,000	250,000	
	- CEA	210,000	140,000	350,000	
	- CA 125	240,000	160,000	400,000	
	- CA 153	240,000	160,000	400,000	
	- PSA	240,000	160,000	400,000	
6.	Cairan Tubuh				
	- Urine Rutin	37,500	25,000	62,500	
	- Sedimen Urin	15,000	10,000	25,000	
	- Feses Rutin	22,500	15,000	37,500	
	- Analisa Sperma	56,250	37,500	93,750	
	- Analisa Cairan Tubuh (Paket)	135,000	90,000	225,000	
	- Darah Samar	21,000	14,000	35,000	
7.	Parasitologi dan Bakteriologi				
	- Malaria Mikroskopis (DDR)	22,500	15,000	37,500	
	- Pembuatan Sediaan BTA (3 Slide)	18,000	12,000	30,000	
	- Pemeriksaan BTA (3 Slide)	42,000	28,000	70,000	
8.	Narkotik dan Obat-obatan	205,200	136,800	342,000	
	- Amphetamine				
	- Opium/Morphine				
	- Cocaine				
	- THC/Ganja				
	- Benzodiazepines				
9.	Mikrobiologi				
	- Sputum BTA (paket)	75,000	50,000	125,000	
	- BTA Kulit	75,000	50,000	125,000	
	- TCM TB	180,000	120,000	300,000	
10.	COVID-19				
	- Antigen Sara Cov-2(Sapid Tes)	60,000	40,000	100,000	
	- PCR/TCM Sara Cov-2	180,000	120,000	300,000	
11.	EKSPRESISE Dokter Spesialis Patologi Klinik				
	- Rawat Jalan	15,000	10,000	25,000	
	- Rawat Inap (Paket)	45,000	30,000	75,000	
J	TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI				
I	FARMASI				
1.	Harga Obat dan Harga Jual Apotek di tambah 30%	50%	50%	100%	
2.	BHP Medis dan Harga Jual Apotek	50%	50%	100%	

	di tambah 30%				
3.	Farmasi Klinik	6,000	6,000	12,000	
4.	Racikan Obat (Pertolongan/kapsul)	1,000	1,000	2,000	
5.	racikan udep	10,000	10,000	20,000	
6.	Visite	37,500	37,500	75,000	
7.	pelayanan HD (mengikuti point 1)				
8.	BIP Medik Hemodialisa	480,000	320,000	800,000	
II	PENGUNAAN OKSIGEN				
1.	Penggunaan Oksigen Per Jam	9,000	6,000	15,000	
2.	Penggunaan Oksigen 1 Tabung	180,000	120,000	300,000	
3.	Penggunaan Selang Oksigen	16,200	10,800	27,000	
III	CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)				
1.	1 Set Pakain Operasi	27,000	18,000	45,000	
2.	1 Tromol Kassa	30,000	20,000	50,000	
3.	1 Set Alat GV	15,000	10,000	25,000	
4.	1 Set Alat SC	39,000	26,000	65,000	
5.	1 Set Ortopedi	42,000	28,000	70,000	
6.	1 Set App	39,000	26,000	65,000	
7.	1 Set Laparatomy	42,000	28,000	70,000	
8.	1 Set Herniatomy	39,000	26,000	65,000	
K	TARIF PENUNJANG NON MEDIK				
I	LAUNDRY				
1.	Laundry / Linen per Kg	9,000	6,000	15,000	
2.	Laundry / Linen Infektius pe Kg	23,400	15,600	39,000	
II	PENGOLAHAN SAMPAH MEDIS				
1.	pengolahan limbah medis padat	39,600	26,400	66,000	
2.	Pengolahan Limbah Cair / Liter	30,000	20,000	50,000	
III	TARIF PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN di RUMAH SAKIT				
1.	Sewa Bangunan Ukuran 7x8 Per Tahun	3,600,000	2,400,000	6,000,000	
2.	Sewa Tanah untuk ATM Per Tahun	6,000,000	4,000,000	10,000,000	
3.	Sewah Tanah Untuk Kios Per Tahun	2,880,000	1,920,000	4,800,000	
4.	Sewah Tanah Untuk Pedagang KL Per Tahun	2,160,000	1,440,000	3,600,000	
5.	Sewah Kios perbulan	240,000	160,000	400,000	
L	TARIF PELAYANAN RS NON PENDIDIKAN				
I	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN				
A.	Pendidikan				
1.	Job Training				
	a. Perawat / Non Perawat	600,000	400,000	1,000,000	Per orang/bulan
	b. Dokter	900,000	600,000	1,500,000	Per orang/bulan
2.	Orientasi				
	a. Study Banding	600,000	400,000	1,000,000	Per Tim / 5 sampai 7 orang
	b. Residensi	510,000	340,000	850,000	Per orang
	c. Benchmarking	510,000	340,000	850,000	Per Tim
3.	Magang				
	a. D3	15,000	10,000	25,000	Per orang/hari
	b. S1	30,000	20,000	50,000	Per orang/hari
	c. S2	45,000	30,000	75,000	Per orang/hari
4.	Pelaksanaan Ujian Praktek Klinik				
	a. Praktek Profesi S1	90,000	60,000	150,000	Per orang

5.	b. Praktek Klinik S1	60,000	40,000	100,000	Per orang	
	c. Praktek Klinik D III/SMK	45,000	30,000	75,000	Per orang	
	Praktik Klinik					
	a. Pendidikan S2 Keperawatan	90,000	60,000	150,000	Per orang/minggu	
	b. Pendidikan S1 Kedokteran	60,000	40,000	100,000	Per orang/minggu	
	c. Pendidikan S1 Kep. & D IV	45,000	30,000	75,000	Per orang/minggu	
	d. Pendidikan D3 Kesehatan/SMK	30,000	20,000	50,000	Per orang/minggu	
	e. Papan Nama Peserta	12,000	8,000	20,000	Per orang	
6.	f. Rolling Ruangan	120,000	80,000	200,000	Per Ruangan	
	g. Pembekalan	120,000	80,000	200,000	Per Materi	
	Praktik Klinik Non Keperawatan					
	a. D3	30,000	20,000	50,000	Per orang/minggu	
	b. S1	60,000	40,000	100,000	Per orang/minggu	
	c. S2	90,000	60,000	150,000	Per orang/minggu	
	B. Penelitian					
	1.	Pengambilan data tanpa Penelitian	60,000	40,000	100,000	Per orang/keali episode
2.	Pengambilan Data dan Penelitian					
	a. Pendidikan S2 dan S3	120,000	80,000	200,000	Per orang/judul	
	b. Pendidikan S1 dan DIV	90,000	60,000	150,000	Per orang/judul	
	c. Pendidikan DIII	75,000	50,000	125,000	Per orang/judul	
	d. Pendidikan SMA/SMK dan sederajat	30,000	20,000	50,000	Per orang/judul	
C. Pelatihan						
1.	Pelatihan					
	a. Pelatihan	90,000	60,000	150,000	Per hari	
	b. Skill Lab	60,000	40,000	100,000	Per orang/kelompok/materi	
	c. Pelatihan BTCLS	2,100,000	1,400,000	3,500,000		
	d. Pelatihan APN	2,100,000	1,400,000	3,500,000		
7.	Aula dan Sound Sistem	150,000	100,000	250,000	Per sekali pakai	
II SURAT KETERANGAN DOKTER						
1.	Burat Keterangan Dokter	6,000	4,000	10,000		
2.	Dokumen perjanjian kerja sama					
	a. Perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah	120,000	80,000	200,000		
	b. Perjanjian kerja sama dengan swasta	150,000	100,000	250,000		
	c. Pelayanan rekomendasi pekerjaan	60,000	40,000	100,000		
	d. Format administrasi keur kesehatan	15,000	10,000	25,000		
3.	Legalisir Dokumen / Lembar	1,200	800	2,000		
M						
TARIF PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH						
I PEMULASAN JENAZAH						
1.	Perawatan Jenazah					
	- Tanpa Pengafanan	150,000	100,000	250,000		
	- Dengan Pengafanan	600,000	400,000	1,000,000		
	- Dengan Pengafanan/Penguburan Mobil Ambulance	750,000	500,000	1,250,000		
2.	Pengewetan Jenazah (Pemberian Formula) sudah dengan Obat	900,000	600,000	1,500,000		
3.	Penyimpanan Jenazah pada Alat Pendingin	150,000	100,000	250,000	Per Hari	
4.	Penyimpanan Jenazah di Kamar Jenazah	12,000	8,000	20,000	Per Hari	
II TRANSPORTASI AMBULANCE						
1.	Pengantaran Pasien Dengan Ambulance					
	- Dalam Kota (10 KM)	6,000	4,000	10,000		

	- Luar Kota (di tambah)	510,000	340,000	850,000	Tiap Kilo Meter
	- Sewa Mobil	6,000	4,000	10,000	
	- BBM	2,100	1,400	3,500	Tiap 8 Km
	- Jasa Perawat	3,000	2,000	5,000	Tiap Kilo Meter
	- Jasa Dokter				Tiap Kilo Meter
2.	Pengantaran Dengan Mobil Sehat				
	a. Zona 1 Kec. Lawuk, Lawuk Utara, Lawuk Selatan dan Nambu	90,000	60,000	150,000	
	b. Zona 2 Kec. Kintom, Lawuk Timur, Batu dan Batu Selatan	120,000	80,000	200,000	
	c. Zona 3 Kec. Masama, Lamala dan Pagimana	150,000	100,000	250,000	
	d. Zona 4 Kec. Busemo, Balantak, Balantak Selatan, Mantok dan Moilong	180,000	120,000	300,000	
	e. Zona 5 Kec. Bunta, Simpang Raya, Nuhon, Toili dan Toili Barat	270,000	180,000	450,000	
III	TARIF MOBIL JENAZAH ANTARA KECAMATAN DALAM KABUPATEN BANGGAI				
1	Lawuk - Dalam Kota 1-30	88,200	58,800	147,000	
	Lawuk - Hunduhan Kintom Uwerdikan				
2	Lawuk - 30-60	148,800	99,200	248,000	
	Bantayan Tungeban Benebakat Sama Tangkian Batu Sinarang				
3	Lawuk - 60-70	178,200	118,800	297,000	
	Pakawa Laba Nipa Labotan Siron Tukupon Guri-guri Muliharjo Pondoi				
4	Lawuk - 80-120	270,000	180,000	450,000	
	Balantak Toima Tuntung Belo Heras Toiba Dumiharjo Moilong Makapa				
5	Lawuk - 120-150	314,400	209,600	524,000	
	Bunta Tomelang Balaan Kampangar Telu Busemo Batu Simpang Binsil Reta				
6	Lawuk - 150-175	382,200	254,800	637,000	
	Balingira Bangketa Tobelomhang Pangkalaneang Makapa, Toili Barat				
IV	TARIF MOBIL JENAZAH DI LUAR KABUPATEN BANGGAI				
1.	Lawuk - Ampapa 250 KM	726,000	484,000	1,210,000	sewa ambulance
2.	Lawuk - Banggai Kepulauan 400 KM	3,180,000	2,120,000	5,300,000	sewa kapal Ferry (PP)
3.	Lawuk - Poso 400 KM	1,090,800	727,200	1,818,000	

4.	Luwuk - Parigi 500 KM	1.242,000	828,000	2.070,000	
5.	Luwuk - Baturube 220 KM	681,000	454,000	1.135,000	
6.	Luwuk - Pandauke 180 KM	616,800	411,200	1.028,000	
7.	Luwuk - Tali-Tali 1000 KM	2.026,800	1.351,200	3.378,000	
8.	Luwuk - Palu 750 KM	1.944,000	1.296,000	3.240,000	
9.	Luwuk - Gorontalo 1600 KM	2.026,800	1.351,200	3.378,000	di luar sewa kapal ferry
10.	Luwuk - Manado 1100 KM	3.396,000	2.264,000	5.660,000	
11.	Luwuk - Makassar 1200 KM	3.552,000	2.368,000	5.920,000	
12.	Luwuk - Bungku 600 KM	2.022,000	1.348,000	3.370,000	
13.	Luwuk - Kolonodale 600 KM	1.944,000	1.296,000	3.240,000	
14.	Luwuk - Buai Tali-Tali 1.100 KM	3.396,000	2.264,000	5.660,000	
N	TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL				
1.	Pemeriksaan Jenazah (pemeriksaan luar)	300,000	200,000	500,000	
2.	Pemeriksaan Jenazah (pemeriksaan luar) untuk orang asing	900,000	600,000	1.500,000	
3.	pemeriksaan dalam (autopsi)	2.160,000	1.440,000	3.600,000	
4.	pemeriksaan dalam (autopsi) untuk orang asing	3.600,000	2.400,000	6.000,000	
5.	Gali kubur (exhumation)	9.000,000	6.000,000	15.000,000	
6.	pemeriksaan kerangka	1.800,000	1.200,000	3.000,000	
7.	Embalming / pengawetan jenazah	1.200,000	800,000	2.000,000	
8.	embalming/ pengawetan jenazah orang asing pengambilan sampel cairan /jaringan toksikologi dan	1.800,000	1.200,000	3.000,000	
9.	Histopatologi Anatomi Konsultasi forensik dan mediokolegal (dokter ahli)	240,000	160,000	400,000	
10.		90,000	60,000	150,000	
11.	Penyimpanan Jenazah perdarigita	150,000	100,000	250,000	Per hari
12.	Penyimpanan jenazah orang asing/hari administrasi dan surat keterangan kematian, asuransi	300,000	200,000	500,000	
13.	dll	120,000	80,000	200,000	
14.	IAP dan saksi ahli	600,000	400,000	1.000,000	
15.	konsultasi rujukan antar spesialis	120,000	80,000	200,000	
16.	Hasil visum et Exortum (korban hidup)	90,000	60,000	150,000	
17.	Jegalsair surat keterangan kematian/lembar	1,200	800	2,000	
18.	Pemeriksaan TKP	480,000	320,000	800,000	
19.	penguburan	360,000	240,000	600,000	
20.	perawatan jenazah	150,000	100,000	250,000	
21.	Pemulasaran jenazah dewasa dan tindakan mengkalori	900,000	600,000	1.500,000	
22.	pemulasaran jenazah anak dan tindakan mengkalori	300,000	200,000	500,000	
23.	Penanganan jenazah infeksius	1.500,000	1.000,000	2.500,000	
24.	penyimpanan jenazah di Kamar Jenazah	12,000	8,000	20,000	Per Jam
25.	Pemeriksaan Narkoba	235,200	156,800	392,000	
26.	Pemeriksaan Alkohol	90,000	60,000	150,000	
27.	Format Rekam Medik	15,000	10,000	25,000	
O	TARIF PENUNJANG MEDIK				
I	REHABILITASI MENTAL (PSIKOLOGI)				
1.	Pemeriksaan Awal	18,000	12,000	30,000	
2.	Pemeriksaan Lanjutan a. Psikoterapi 45 Menit	30,000	20,000	50,000	

3.	b. Konsultasi 45 Menit	30,000	20,000	50,000	
	Palpatasi				
	a. Pemeriksaan Sederhana	21,000	14,000	35,000	
	b. Pemeriksaan sedang	36,000	24,000	60,000	
	c. Pemeriksaan Canggih	54,000	36,000	90,000	
II	REHABILITASI MEDIK				
	Biofeedback	90,000	60,000	150,000	
	Low Level Laser Therapy	60,000	40,000	100,000	
	High Level Laser Therapy	120,000	80,000	200,000	
	Dry Needling	90,000	60,000	150,000	
	Spray & Stretch	90,000	60,000	150,000	
	Tapping & Strapping				
	Tapping & Strapping ringan (melibatkan 1 sendi & 1 teknik)***	54,000	36,000	90,000	
	Tapping & Strapping sedang (melibatkan 1 sendi, 2 teknik atau 2 sendi, 2 teknik)***	108,000	72,000	180,000	
	Tapping & Strapping berat (melibatkan > 2 sendi dan >2 teknik)***	156,000	104,000	260,000	
	Injeksi Intraartikular rehabilitasi medik				
	Injeksi Intraartikular ringan (1-3 titik injeksi)***	90,000	60,000	150,000	
	Injeksi Intraartikular sedang (4-6 titik injeksi)***	108,000	72,000	180,000	
	Injeksi Intraartikular berat (> 6 titik injeksi)***	156,000	104,000	260,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain rehabilitasi medik				
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain tanpa guidance ringan (1-3 titik injeksi) ***	78,000	52,000	130,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain tanpa guidance sedang (4-10 titik injeksi)***	156,000	104,000	260,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain tanpa guidance berat (> 10 titik injeksi) ***	210,000	140,000	350,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain dengan guidance ringan (1-3 titik injeksi) ***	102,000	68,000	170,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain dengan guidance sedang (4-10 titik injeksi)	210,000	140,000	350,000	
	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan injeksi lain dengan guidance berat (> 10 titik injeksi) ***	270,000	180,000	450,000	
	Continuous Passive Movement	48,000	32,000	80,000	
	Casting***	90,000	60,000	150,000	
	Terapi Edukasi bidang Rehabilitasi Medik				
	- Dewasa	60,000	40,000	100,000	
	- Anak	60,000	40,000	100,000	
	- Terapi Edukasi Kelompok (semua kelompok stroke, osteoporosis, lansia)	72,000	48,000	120,000	
	Rehabilitasi Palatif/Evaluasi kondisi sosial	60,000	40,000	100,000	
	Nebulizer***	48,000	32,000	80,000	
	Recreation Therapy/Group Therapy	72,000	48,000	120,000	
	Fitting dan checkout Sepatu Koreksi	60,000	40,000	100,000	
	Fitting dan checkout Alat Bantu Jalan	60,000	40,000	100,000	
	Fitting dan checkout Ortesis	60,000	40,000	100,000	
Fitting dan checkout Protesa	60,000	40,000	100,000		
Uji sensitivitas	66,000	44,000	110,000		
Uji fungsi kognisi	66,000	44,000	110,000		

Uji fungsi komunikasi	66,000	44,000	110,000
Uji fungsi menelan	66,000	44,000	110,000
Uji fungsi integrasi sensoris	66,000	44,000	110,000
Uji keseimbangan statis dan dinamis	66,000	44,000	110,000
Uji Postur kontrol	66,000	44,000	110,000
uji fungsi eksekusi gerak	66,000	44,000	110,000
Uji Fungsi kekusutan otot	99,000	66,000	165,000
Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	66,000	44,000	110,000
Uji motorik halus	66,000	44,000	110,000
uji fungsi lokomotor	66,000	44,000	110,000
Uji Pado Jalan	66,000	44,000	110,000
Uji Dekondisi	66,000	44,000	110,000
Uji Kemampuan fungsional dan perawatan	66,000	44,000	110,000
Uji fungsi Kardiorpulmonar			
- Uji fungsi Kardiorpulmonar Ringan	36,000	24,000	60,000
- Uji fungsi Kardiorpulmonar Sedang	48,000	32,000	80,000
- Uji fungsi Kardiorpulmonar Berat	84,000	56,000	140,000
Uji Berkemih	108,000	72,000	180,000
Uji Fungsi Defekasi	108,000	72,000	180,000
Latihan Koordinasi/ Keterampilan Motorik/Frenkel Exercise, NDT, PNF, Motor learning program)	60,000	40,000	100,000
Terapi Latihan (skoliosis, osteoporosis)	60,000	40,000	100,000
Traksi cervical/humbal	30,000	20,000	50,000
Latihan Ambulasi/ Latihan Keseimbangan	30,000	20,000	50,000
Latihan Jalan Menggunakan Protesa	36,000	24,000	60,000
Pool Therapy	60,000	40,000	100,000
Whirpool Bath	36,000	24,000	60,000
Hubbard Tanks/ Contrast Bath/ Paise Lavage/ Butterfly Bath (Hydrotherapy Lainnya)	36,000	24,000	60,000
Ultrasound Diathermy (USD) 1 ekstremitas /bagian**	30,000	20,000	50,000
Shortwave Diathermy (SWD) 1 ekstremitas /bagian**	36,000	24,000	60,000
Microwave Diathermy (MWD) 1 ekstremitas /bagian**	30,000	20,000	50,000
Paraffin Bath	30,000	20,000	50,000
Infra Merah	30,000	20,000	50,000
TENS/Interferensi/NMES/Paradic/Galvanic (1 ekstremitas /bagian)***	30,000	20,000	50,000
Massage	36,000	24,000	60,000
Terapi Manipulasi manual	36,000	24,000	60,000
Manual Lymphatic Drainage (MLD) pada 1 ekstremitas	48,000	32,000	80,000
Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Dyspraxia)	48,000	32,000	80,000
Tatalaksana Gangguan Berbahasa	48,000	32,000	80,000
Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	60,000	40,000	100,000
Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Fasial	51,000	34,000	85,000
Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	51,000	34,000	85,000
Tatalaksana Gangguan Artikulasi	51,000	34,000	85,000
Tatalaksana Keterlambatan Bicara	51,000	34,000	85,000
Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	60,000	40,000	100,000
Tatalaksana Gangguan Menelan	51,000	34,000	85,000
Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari	51,000	34,000	85,000
Music Therapy	51,000	34,000	85,000
Penanganan Persepsi-Kognisi	52,800	35,200	88,000

Terapi Multi Sensori Integrasi	52,800	35,200	88,000
Tatalaksana Gangguan Somato-Sensori	52,800	35,200	88,000
Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak Postural Drainage	51,000	34,000	85,000
- Anak	36,000	24,000	60,000
Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	30,000	20,000	50,000
Ultra Violet Radiation (UVB)	30,000	20,000	50,000
Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Test	72,000	48,000	120,000
Tes Kepribadian	72,000	48,000	120,000
Konseling Psikologis	30,000	20,000	50,000
Peningkatan Minat & Bakat	72,000	48,000	120,000
Radial Shockwave Therapy	180,000	120,000	300,000
Latihan Pasif	36,000	24,000	60,000
Latihan Aktif Muskuloskeletal	36,000	24,000	60,000
Latihan resistif dengan alat	36,000	24,000	60,000
Latihan gerak acidi	36,000	24,000	60,000
Latihan mobilisasi tulang belakang	36,000	24,000	60,000
Latihan mobilisasi sendi	36,000	24,000	60,000
Latihan Nafas	36,000	24,000	60,000
Latihan stretching/koreksi deformitas	51,000	34,000	85,000
Terapi kombinasi Alat (lebih dari 1 latihan)	60,000	40,000	100,000
Terapi pernafasan/chest fisioterapi	36,000	24,000	60,000
Latihan immobilisasi	36,000	24,000	60,000
Terapi okupasi	60,000	40,000	100,000
Terapi vokasional	60,000	40,000	100,000

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Pemeriksaan / Poli Klinik Puskesmas	20,000	sudah termasuk obat
2	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan Fisik	50,000	
3	Pemeriksaan Narkoba	200,000	
4	Pemeriksaan EKG	50,000	
B	TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)		
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	10,000	
2	Visum et Repertum	50,000	
3	Rawat sehari (One Day Care)	30,000	Tarif disamakan dengan Rawat Siang (Day Care)
4	Tindakan Medik Darurat Non Operatif		

	a. Kecil	15,000	Bersihkan Luka/ Ganti Perban, Pasang Infus, UP Spalk, Buka Kateter
	b. Sedang	25,000	pasang kateter, pasang spalk, Perawatan Luka, Pasang Ransel Perban, Pasang Sonde Lambung, Mitella, hecting luka kecil/ sedang (10 cm)
	c. Besar	50,000	Kumbah Lambung, ekstraksi corpus, alienum, luka bakar > 10%, lumba punksi, defibrilasi/DC shock, hecting luka besar dan multiple,extr aksikuku
C	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Kelas III (Visite)	10,000	Per Hari
2	Kelas III (Rawat Inap)	50,000	Per Hari
D	TARIF PELAYANAN MEDIK		
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Kecil	15,000	cateterisasi bulli - bulli, vena punksi, pemasangan sonde lambung
	b. Sedang	20,000	defibritasi, ventilasi resusitasi, candio pulmoner
	c. Besar	40,000	
2	Tindakan medik gigi:		
	a. Ekstraksi gigi susu	50,000	
	b. Ekstraksi gigi tetap	75,000	
	c. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	100,000	
	d. Tambal Gigi sementara	75,000	
	e. Tambal Gigi fuji / silika	100,000	
	f. Alveolectomy Perkwadran	100,000	
	g. Eksisi mukosa	100,000	
	h. Insisi abses	100,000	
	i. Scalling gigi satu rahang	100,000	
	j. Scalling gigi dua rahang (simple)	150,000	
	k. Scalling gigi dua rahang (kronis)	250,000	

	l. Tindakan Citoject	30,000	
E	JASA PELAYANAN KEBIDANAN		
1	Pemeriksaan USG	100,000	
2	Persalinan normal	800,000	Partus spontan letak belakang
3	Persalinan dengan tindakan	1,000,000	Setiap Pelayanan
4	Pasang/UP Implan/IUD	100,000	
F	PELAYANAN FARMASI		
1	Obat dan alat kesehatan habis pakai	130 %	Harga obat ditetapkan sebesar harga beli (harga netto) + 30%
2	Racikan per bungkus	2,000	
3	Gas Oksigen	HN + (125% x HN)	Harga obat ditetapkan sebesar harga beli (harga netto) + 25%
G	TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM PUSKESMAS DAN AMBULANCE PUSKESMAS		
1	HEMATOLOGI		
	a) Hb, Erositosis, Hm, Leukosit, hitung jenis leukosit, trombosit	10,000	Setiap Pemeriksaan per item masing-masing sesuai tarif yang ada
	b) Masa pembekuan, masa pendarahan, Retikulosit eosinofil, LED	10,000	
	c) Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S/ serum ion	20,000	
2	KIMIA DARAH		
	a) Glukosa, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT	20,000	
	b) Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin total, Bilirubin indirek, Alkali fosfatase, Gama GT, Chol. LDL, Chol. HDL, TG, Asam urat	24,000	
3	IMUNOSEROLOGIS		
	a. Golongan Darah	10,000	
	b. Tes Kehamilan	7,000	
	c. VDRL, Widal, ASTO	36,000	
	d. HBs Ag	60,000	
	e. Anti HBs (Lualitatif)	80,000	
4	PEMERIKSAAN LAINNYA		
	a. Faeses: Rutin, darah sama	10,000	
	b. Urin analisis	24,000	
	c. Malaria	10,000	
	d. BTA	10,000	
5	PEMAKAIAN AMBULANCE		
	a. Dalam kota maksimum 10 Km	17,500	belum termasuk bahan bakar
	b. Luar kota/jam	65,000	
	c. Jasa petugas pengantar orang sakit:		
	1). Dalam kota maksimum 10Km	25,000	
	2). Luar kota tiap Km	2,500	

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT PRATAMA**

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN Pemeriksaan/ Poliklinik :		
1.	Dokter Ahli	100,000	Pelayanan Rumah Sakit sudah termasuk obat
	Dokter Umum	50,000	
2.	General Check Up		
	a. Sederhana	250,000	General Check Up Sederhana : Pem . Fisik , Laboratorium : darah rutin, urine rutin, Buta warna, Kimia Darah (Gula Darah, Kolestrol, Asam Urat).
	b. Sedang	350,000	General Check Up Sederhana : Pem . Fisik , Laboratorium : darah rutin, urine rutin, Buta warna, Kimia Darah (Gula Darah, Kolestrol, Asam Urat), Tes fungsi hati (albumin, Globulin, Bilirubin , SGOT , SGPT , Alkali Fosfatase) , Glukosa , Ureum, Creatinin , Uric Acid, Cholesterol, ECG
B.	TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	35,000	
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	65,000	
3.	Visum et Repertum	150,000	
4.	Rawat Sehari (One Day Care)	85,000	
C.	TINDAKAN MEDIK DARURAT NON OPERATIF KELAS III		
	a. Kecil	250,000	Penyakit dalam Cateterisasi buli-buli, Vena Pungsi, Pemasangan Sonde lambung
		150,000	BEDAH Cateterisasi huli-abuli, Bouginasi, Traksi kulit, Ransel verban, Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi
		150,000	Penyakit Kandungan Pasang Implant/ IUD, Ekstraksi IUD, Pap Smear,

			<p>Kuldo sintesis, Kryo, Amnisentesis, Pasang kateter, Vena pinksi, Pasang laminaria</p> <p>Anak</p> <p>Pungsi vena, Perawatan tali pusat, Matoux test</p> <p>THT</p> <p>Toilet liang telinga dan hidung,</p> <p>Pemasangan tampon telinga, Ekstraksi benda asing dilubang hidung,</p> <p>Politerisasi/caterisap tubal</p>
	b. Sedang	150,000	
		150,000	Penyakit Dalam
		200,000	Defibritasi, Ventilasi, Resusitasi, Cardio pulmoner, Lumbal punksi
		200,000	BEDAH
		200,000	Perawatan luka bakar >10% dengan komplikasi tanpa operasi
		200,000	Penyakit kandungan
		200,000	Buka implant, Manual placenta
	c. Besar	200,000	Anak
		250,000	Perawatan bayi dengan incubator, Pemasangan sonde lambung, Pemasangan kateter buli-buli
		250,000	THT
		250,000	Parasintesis miringotomi, Spuling sinusmaksilarispasca CL ₂ , Ganti canul trachea/dekalunisasi
		250,000	Penyakit Kandungan
		250,000	Hydrotubasi/ partubasi
		250,000	Anak
			Resusitasi bayi baru lahir
D	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Kelas III	100,000	ICU : biaya perawatan disesuaikan tarif masing-masing kelas + 50 %
2	Konsul antar Dokter Ahli	30,000	
3	Visite dokter umum	20,000	
4	Visite dokter ahli	40,000	

E	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF a. Kecil b. Sedang c. Besar	100,000 150,000 350,000 500,000 600,000	<i>Tindakan Cito (tindakan diluar jam kerja/ hari libur) tarif pelayanan ditambah 50%</i> Penyakit Dalam <i>Pungsi tuli-buli</i> Bedah <i>Tumor jinak kulit (Kista Atheroma Clavus Uk. <2 cm, Ganglion dan Tumor jinak, Kulit kecil lainnya, Circumsisi tanpa komplikasi, Vena seksi, nsisi Abses tanpa narcose umum, Pungsi tuli-buli, PROEP pungsi, CVP, Ekstraksi kulum</i> Penyakit Dalam <i>pungsi cairan Pleura/ Acites, Vena seksi</i> Bedah <i>Hernia tanpa komplikasi,, Hydrocole/ variocole, Appendicitis Chronis tanpa komplikasi tumor jinak kulit/ sub kutis/ payudara, Circumsisi dengan komplikasi Reposisi+ Imobilisasi semua jenis patah tulang tertutup, Reposisi semua jenis luxatio/ dislokasi sendi,</i> Pemasangan traksi, Penyakit pembuluh darah perifer, Gigitan binatang (Debridement), Eksplorasi Corpus Ileum cacat bawah simple, Reoperatif (akibat tindakan Operatif) dilakukan dengan Narcosis, Debriment /reposisi terbuka, immobilisasi semua jenis patah tulang, Semua jenis tindakan amputasi. <i>Sequesterectomi pada osteomyelitis pendarahan: (thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah).</i>
---	---	---	--

			Hernia Irreponibilis, Appendicitis Acute, ileus Obstructiva, batu tractus urinarius tumor: pembuluh darah, tyroid, (rahang) spelectomi, cacat bawaan duplex. myelograf, tracadiaper.
F	TARIF PELAYANAN DI POLIKLINIK GIGI		
1	Ekstraksi Gigi Susu	50,000	
2	Ekstraksi Gigi Tetap	75,000	
3	Ekstraksi Gigi Tetap dengan komplikasi	100,000	
4	Tambal gigi sementara	75,000	
5	Tambal gigi dengan Fuji/ Silika	100,000	
6	Tambal gigi amalgam	75,000	
7	Ondontectomy gigi dengan rahang kecil (ringan)	200,000	
8	Ondontectomy gigi dengan rahang besar (berat)	300,000	
9	a. Scaling gigi satu rahang b. Scaling gigi dua rahang c. Scaling gigi dua rahang (kronis)	100,000 150,000 250,000	
10	Tindakan Cltoject	30,000	
G	TARIF PELAYANAN KEBIDANAN		
1	Persalinan Normal	800,000	<i>Tarif termasuk biaya inap ibu dan bayi 50% dari rawat inap ibu,</i> <i>Persalinan normal:</i> <i>Partus spontan letak belakang kepala</i>
2	Persalinan dengan Tindakan	1,000,000	<i>Persalinan dengan tindakan per vaginam:</i> <i>Partus sungsang,</i> <i>Gemeli,</i> <i>Vacum ekstraksi,</i> <i>Forceps</i> <i>Pemeriksaan Kehamilan</i>
3	USG	75,000	
H	PELAYANAN FARMASI		
1	Obat dan alat kesehatan habis pakai	130%	Harga obat ditetapkan harga beli (harga netto) + 30%
2	Racikan Per Resep	2,000	
3	Oksigen	125% x HN	
I	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DAN AMBULANCE RUMAH SAKIT PRATAMA		
1	Hematologi		
	a. Hb, Eritrosit, Hm, Leukosit, hitung jenis, leukosit, Trombosit	35,000	
	b. Masa Pembekuan, masa pendarahan, Retikulosit, Eosinofil, LED	35,000	
	c. Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S Serum Ion	35,000	
2	Kimia Darah		
	a. Glukosa, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT	35,000	
	b. Protein tota l, Albumin, Globulin, Bilirubin total, Bilirubin Indirect Immunologis	35,000	

3	a. Golongan Darah	30,000	
	b. Tes Kehamilan	30,000	
	c. VDRL, Widal<ASTO	50,000	
	d. Hbs Ag	80,000	
4	Pemeriksaan Lainnya		
	a. Faeces : Rutin, darah samar	30,000	
	b. Urine analisis	30,000	
	c. Malaria	30,000	
	d. BTA	30,000	
5	Ultrasonografi (USG)	135,000	
6	Elektrokardiografi (EKG)	110,000	
7	Nebulizer	60,000	
8	PEMAKAIAN AMBULANCE		
	a. Dalam Kota maksimum 10 km	20,000	
	b. Luar kota per/jam	60,000	
	c. Jasa petugas pengantar orang sakit :		
	1). Dalam kota max 10 km	25,000	
	2). Luar kota tiap km	2,500	

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 79

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan klasifikasi dan jangka waktu layanan.
- (2) Jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 81

Struktur dan Besaran tarif pelayanan kebersihan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RUMAH TINGGAL PERMANEN			
	a. Luas Bangunan < 70m ²	20,000	Bulan	
	b. Luas Bangunan 71 s.d 300m ²	30,000	Bulan	
	c. Luas Bangunan > 300m ²	40,000	Bulan	
2	RUMAH TINGGAL SEWA PERMANEN			
	a. Luas Bangunan < 70m ²	50,000	Bulan	
	b. Luas Bangunan 71 s.d 300m ²	70,000	Bulan	
	c. Luas Bangunan > 300m ²	100,000	Bulan	
3	GEDUNG KOMERSIAL			
	a. Pertokoan Permanen	50,000	Bulan	
	b. Toko Permanen di wilayah pemukiman	40,000	Bulan	
4	PERKANTORAN SWASTA			
	a. Besar (Kategori Luas Bangunan > 300m ²)	150,000	Bulan	
	b. Sedang (Kategori Luas Bangunan 71 s.d 300m ²)	100,000	Bulan	
	c. Kecil (Kategori Luas Bangunan < 70m ²)	75,000	Bulan	
5	HOTEL			
	a. Hotel Bintang 3 ke atas	1,250,000	Bulan	
	b. Hotel Bintang 1 s/d 2	1,000,000	Bulan	
	c. Hotel Non Berbintang	750,000	Bulan	
	d. Penginapan/Wisma/Losmen/Homestay	250,000	Bulan	
6	GUDANG			
	a. Gudang Kecil (Luas kurang dari 2.500m ²)	100,000	Bulan	
	b. Gudang Sedang (Luas 2.500m ² s/d 10.000m ²)	150,000	Bulan	
	c. Gudang Besar (Luas > 10.000m ²)	250,000	Bulan	
7	INDUSTRI			
	a. Industri Kecil (Kategori: Tenaga kerja kurang dari 19 orang)	250,000	Bulan	
	b. Industri Sedang (Kategori: Tenaga kerja antara 19 s/d 99 orang)	500,000	Bulan	
	c. Industri Besar (Kategori: Tenaga kerja diatas 99 orang)	750,000	Bulan	
8	KIOS			

	a. Kios Permanen	50,000	Bulan	
	b. Kios Non Permanen	30,000	Bulan	
9	TEMPAT HIBURAN			
	a. Gedung serbaguna	250,000	Bulan	
	b. Tempat Karaoke	250,000	Bulan	
	c. Diskotik / Clubing	250,000	Bulan	
10	GEDUNG MILIK SWASTA UNTUK PENYELENGGARAAN			
	a. Perguruan Tinggi	250,000	Bulan	
	b. Kursus-kursus	100,000	Bulan	
	c. SLTA/SLTP/SD/TK	150,000	Bulan	
11	SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA			
	a. Rumah Sakit Swasta	350,000	Bulan	
	b. Klinik	250,000	Bulan	
12	SARANA OLAH RAGA MILIK SWASTA			
	a. Gedung / Lapangan Olah Raga	100,000	Bulan	
	b. Gedung Fitnes / Gym	75,000	Bulan	
13	RESTORAN	200,000	Bulan	
14	RUMAH MAKAN/CAFÉ/WARKOP/KEDAI			
	a. Permanen	50,000	Bulan	
	b. Non Permanen	35,000	Bulan	
15	APOTEK	100,000	Bulan	
16	TOKO OBAT	50,000	Bulan	
17	OPTIK	50,000	Bulan	
18	BANK			
	a. Bank Cabang/Pembantu	200,000	Bulan	
	b. Bank Unit	150,000	Bulan	
19	SWALAYAN			
	a. Minimarket	150,000	Bulan	
	b. Supermarket	200,000	Bulan	
	c. Hypermarket	250,000	Bulan	
20	Salon/Pangkas Rambut/Barbershop			
	a. Permanen	50,000	Bulan	
	b. Semi Permanen	40,000	Bulan	
21	USAHA FOTO KOPI			
	a. Permanen	100,000	Bulan	
	b. Semi Permanen	50,000	Bulan	
22	Pencucian Kendaraan			
	a. Mobil	50,000	Bulan	
	b. Motor	25,000	Bulan	

23	PENGANGKUTAN SENDIRI KE TPA			(Bukan Material, Pangkasan, dan Limbah Industri maupun Limbah Berbahaya) dan sampahnya telah terpilah dari Rumah/asal sampah
	Oleh orang pribadi atau badan			
	a. Mobil Truk	100,000	Rit	
	b. Mobil Kecil	75,000	Rit	
	c. Kendaraan Roda Tiga	50,000	Rit	
24	Penggunaan Armada Penyedotan Kakus/Tinja:			
	a. Bangunan Swasta	500,000	Rit	Per Rit untuk armada 5.000 liter/M3
	b. Bangunan Usaha	350,000	Rit	
	c. Rumah Tinggal	300,000	Rit	
	d. Luar Kota			Sesuai jarak diatur dengan keputusan Bupati

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 82

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 83

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Parkir Tepi Jalan Umum		
	1. Sepeda Motor	2,000	per sekali parkir
	2. Kendaraan Roda Empat Berukuran Sedang		
	a. Sedan	2,000	per sekali parkir
	b. Jeep, Mini Bus dan Pick Up dan sejenisnya	2,500	
	3. Kendaraan Roda Empat Berukuran Besar (Bus, Truck dan Alat besar lainnya)	5,000	per sekali parkir

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 84

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85

Struktur dan besaran tarif pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO	LOKASI PASAR / KLASIFIKASI	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Kecamatan Luwuk Pasar Sentral			
	a. Petak	7,000	Per hari	
	b. Los	5,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
2	Kecamatan Luwuk Selatan Pasar Simpang			
	a. Petak	7,000	Per hari	
	b. Los	5,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
3	Kecamatan Luwuk Utara 1. Pasar Unjulan			
	a. Petak	7,000	Per hari	
	b. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
	2. Pasar Salodik			
	a. Petak	2,000	Per hari	
	b. Los	2,000	Per hari	
4	Kecamatan Pagimana			
	a. Petak	7,000	Per hari	
	b. Los	5,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
5	Kecamatan Lobu			
	a. Los	2,000	Per hari	
	b. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
6	Kecamatan Bunta			
	a. Petak	5,500	Per hari	
	b. Los	3,000	Per hari	
	c. Emperan	2,500	Per hari	
	d. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
7	Kecamatan Simpang Raya			
	a. Petak	2,000	Per hari	
	b. Los	2,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
8	Kecamatan Balanrak			
	a. Petak	4,000	Per hari	
	b. Los	2,000	Per hari	
9	Kecamatan Batui			
	a. Petak	5,500	Per hari	
	b. Los	3,000	Per hari	
	c. Emperan	2,500	Per hari	
	d. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
10	Kecamatan Batui Selatan 1. Pasar Ombolu			
	a. Los	2,000	Per hari	
	b. Emperan	2,000	Per hari	

	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
	2. Pasar Gori-gori			
	a. Los	2,000	Per hari	
	b. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
11	Kecamatan Toili			
	a. Petak	5,500	Per hari	
	b. Los	3,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
12	Kecamatan Toili Barat			
	a. Petak	5,500	Per hari	
	b. Los	3,000	Per hari	
	c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap	4,000	Per hari	
13	Kecamatan Moilong	4,000	Per hari	

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 89

Struktur dan besaran tarif layanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS TEMPAT KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kios Kuliner	150,000	Per Bulan	Pariwisata
2	Kios Cindramata	100,000	Per Bulan	Pariwisata
3	Pelayanan Pasar Hewan/Jasa penggunaan pasar hewan			
	1) Sapi/Kuda/Kerbau	5,000	Ekor	Peternakan
	2) Kambing/Domba/Babi	2,500	Ekor	Peternakan

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 91

Struktur dan besaran tarif Pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) :			
	a. Meja tempat jual ikan	10,000	Per Hari	
	b. Los TPI	100,000	Per Bulan	
	c. Kios Mini	250,000	Per Bulan	
	d. Keranjang Ikan	2,500	Per Hari	
	e. Es Balok	17,000	Per Baiok	
	f. Cool Box:			
	1) 100 liter	30,000	Per Bulan	
	2) 200 liter	130,000	Per Bulan	
	3) 500-660 liter	200,000	Per Bulan	
	g. Es Kruser (pemecah es)	150,000	Per Bulan Per Mesin	
2	Jasa tanah dan lahan :			
	a. Lahan	30,000	Per m ² /Tahun	
	b. Penjemuran Jaring/ Penjemuran Ikan			
	1) Terbuka Beratap	1,500	Per m ² /Hari	
	2) Terbuka Tidak Beratap	1,000	Per m ² /Hari	
	c. Penumpukan Barang			
	1) Terbuka Beratap	1,500	Per m ² /Hari	
	2) Terbuka Tidak Beratap	1,000	Per m ² /Hari	
3	Tempat tambat kapal perikanan di TPI Jasa Tambat Kapal :			
	1). Kapal Perikanan			
	a) Ukuran Kapal 5 s.d 30 GT	500	Per meter panjang kapal per tambat	
	b) Ukuran Kapal >30 s.d 100 GT	750	Per meter panjang kapal per tambat	
	2). Kapal Non Perikanan Penunjang Kapal Perikanan	15,000	Per meter panjang kapal per tambat	
	3). Kapal Non Perikanan non Penunjang Kapal Perikanan	50,000	Per meter panjang kapal per tambat	

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 93

Struktur dan Besaran tarif pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan ditetapkan sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Pelataran/Lingkungan Aset milik Pemda	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Mobil Pick up dan sejenisnya	2,500	Per Parkir	
		b. Bus, truck Alat besar/berat	5,000	Per Parkir	
		c. Sepeda motor	2,000	Per Parkir	
2.	Taman/Tempat Wisata	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Mobil Pick up dan sejenisnya	2,500	Per Parkir	
		b. Bus, truck, Alat besar/berat	5,000	Per Parkir	
		c. Sepeda motor	2,000	Per Parkir	

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 94

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan /pesanggrahan/vila.

Pasal 95

Struktur dan besaran tarif layanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3		4
	LAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	A. Mess Pemda Mutiara Palu			
	- Kamar Standar A	100,000	Per Hari	
	- Kamar Standar B	150,000	Per Hari	
	B. Mess Pemda Mutiara Jakarta			
	- Kamar De Lux A	150,000	Per Hari	
	- Kamar De Lux B	100,000	Per Hari	
	C. Cottage	150,000	Per Hari	Pariwisata

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 96

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, dan jenis pelayanan.

Pasal 97

Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah potong hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	5	4
	Pelayanan Rumah Potong Hewan :			
	a. Pemakaian tempat pemotongan hewan ternak	1) Sapi/Kerbau	55,000	Ekor
		2) Kambing/Domba/Babi	12,500	Ekor
		3) Unggas	1,000	Ekor
	b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak Sebelum dipotong	1) Sapi/Kerbau	20,000	Ekor
		2) Kambing/Domba/Babi	10,000	Ekor
		3) Unggas	1,000	Ekor
	c. Pemeriksaan daging hewan/ ternak setelah dipotong (Keur Master)	1) Sapi/Kerbau	10,000	Ekor
		2) Kambing/Domba/Babi	3,000	Ekor
		3) Unggas	500	Ekor

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 98

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 99

Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS JASA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	4	3	5
1	Jasa Pelayanan Kapal			
	Jasa Tambat Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu), Tambatan Pinggiran/Talud	175	Per GT/Etmal	
2	Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	5,000	Per Ton/m ³ /Hari	
	b. Lapangan	3,000	Per Ton/m ³ /Hari	
3	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan			
	a. Tanda Masuk Pelabuhan (Penumpang)	2,000	Per orang/sekali masuk	
	b. Tanda Masuk Kendaraan R.2	2,000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	c. Tanda Masuk Kendaraan R.4	5,000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	d. Tanda Masuk Kendaraan R.>6	7,000	Per Kendaraan/sekali masuk	
4	Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya			
	a. Jasa sewa tanah dalam areal Pelabuhan	10,000	Per m ² /Bulan	
	b. Jasa sewa bangunan gedung/kantor dalam areal Pelabuhan	15,000	Per m ² /Bulan	
	c. Tanda Masuk Pelabuhan Orang Yang Tidak Menyeberang	2,000	Per orang/sekali masuk	

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga

Pasal 100

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Pasal 101

Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kunjungan Wisata :			
	a. Wisatawan Mancanegara	15,000	per orang	
	b. Wisatawan Domestik	5,000	per orang	

2	Penggunaan Fasilitas :			
	a. Gazebo			
	1) Gazebo Komunal (4 x 8m)	75,000	per Hari	
	2) Gazebo Swafoto (4 x 4m)	50,000	per Hari	
	3) Gazebo Kecil (2,5 x 2,5m)	30,000	per Hari	
	b. Wahana Flying Fox	30,000	per orang	
3	Pemakaian Sarana Olahraga			
	a. Pemakaian Stadion Kilongan	250,000	Per Hari	
	b. Pemakaian Lapangan Persibal	250.000	Per Hari	
	c. Gedung Olah Raga Kilongan	1.000.000	Per Hari	
	d. Gedung Olah Raga Sudarto Center	1.000.000	Per Hari	

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 102

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan volume produksi usaha Daerah.

Pasal 103

Struktur dan besaran tarif retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK PENJUALAN	TARIF (Rp)2	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penjualan Bibit Ikan			
	a. Benih Ikan Koi			
	1) Ukuran 3 Cm	2,000	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	5,000	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	10,000	per ekor	
	4) Ukuran 10 Cm	20,000	per ekor	
	5) Ukuran 15 Cm	35,000	per ekor	
	6) Ukuran 20 Cm	50,000	per ekor	
	b. Benih Ikan Mas			
	1) Ukuran 3 Cm	300	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	500	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	1,000	per ekor	
	4) Ukuran 10 Cm	1,500	per ekor	
	5) Ukuran 15 Cm	2,000	per ekor	
	6) Ukuran 20 Cm	2,500	per ekor	
	c. Benih Ikan Gurame			
	1) Ukuran 3Cm	1,000	per ekor	
	2) Ukuran 5Cm	1,500	per ekor	
	3) Ukuran 8Cm	2,000	per ekor	

	4) Ukuran 10 Cm	3,000	per ekor	
	5) Ukuran 15 Cm	4,000	per ekor	
	6) Ukuran 20 Cm	5,000	per ekor	
	d. Benih Ikan Bawal			
	1) Ukuran 3 Cm	1,000	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	1,500	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	2,000	per ekor	
	f. Benih Ikan Lele			
	1) Ukuran 3 Cm	300	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	500	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	1,000	per ekor	
	g. Benih Ikan Patin			
	1) Ukuran 3 Cm	1,000	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	1,500	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	2,000	per ekor	
	h. Benih Ikan Nila			
	1) Ukuran 3 Cm	300	per ekor	
	2) Ukuran 5 Cm	500	per ekor	
	3) Ukuran 8 Cm	1,000	per ekor	
	4) Ukuran 10 Cm	1,500	per ekor	
	5) Ukuran 15 Cm	2,000	per ekor	
	6) Ukuran 20 Cm	2,500	per ekor	
2	- Sewa Videotron Jam 08.00 - 24.00 Wita	500	Per Detik	
	- Sewa Space Iklan	150,000	Per Hari	diluar jasa pemasangan
3	PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM			
	a. Agregat			
	Pemakaian alat uji Analisa Saringan	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Berat Jenis dan Penyerapan Ag. Halus	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Berat Jenis Dan Penyerapan Ag. Kasar	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Berat Jenis Tanah	35,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Berat Isi	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Lolos Saringan No. 200	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Abrasi	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Indeks Kepipihan dan Kelonjongan	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Uji Kekuatan Agregat (AIV)	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Sand Equivalent	100,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Crushing	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Kadar Organic	50,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Kadar Lumpur	45,000	Per Pemakaian	
	b. Tanah Dan Batuan			
	Pemakaian alat uji Kadar Air	7,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Atterberg Limit	35,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Pemadatan Modified	83,700	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji Pemadatan Standar	45,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji CBR Modified Laboratorium	109,000	Per Pemakaian	
	Pemakaian alat uji CBR Standar Laboratorium	104,700	Per Pemakaian	

c. Aspal		
Pemakaian alat uji Daktilitas Aspal	60,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Berat Jenis Aspal	31,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Kelekatan Terhadap Aspal	45,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Kekentalan Aspal	50,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Penetrasi Aspal	55,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Titik Nyala Dan Titik bakar Aspal	85,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Titik Lembek Aspal	35,000	Per Pemakaian
d. Semen		
Pemakaian alat uji Kehalusan Semen Portland	90,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Berat Jenis semen	45,000	Per Pemakaian
e. Pengujian Bahan Campuran Aspal		
Pemakaian alat uji Test Marshall	30,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Density (berat Jenis Campuran)	45,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Kadar Aspal	5,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Ekstraksi Teknis	175,000	Per Pemakaian
f. Pengujian Kuat Tekan		
Pemakaian alat uji Kuat Tekan Beton cilynder	22,500	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Capping Cilynder	15,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Kuat Tekan Beton Kubus	15,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Pemakaian alat uji Kuat Tekan Paving Blok	15,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Kuat Tekan Mortar	15,000	Per Pemakaian
g. Job Mix Design		
Pemakaian alat uji Perencanaan Campuran aspal (15 Sampel Briket)	453,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Perencanaan Campuran Beton (per Mutu Beton)	592,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Perencanaan Campuran Timbunan/urugan	439,800	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Perencanaan Campuran Lapis Pondasi Agregat	439,800	Per Pemakaian
h. Jenis Pengujian Di Lapangan		
Pemakaian alat uji Sondir Test	175,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Suhu	7,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Sandcone Test	100,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji CBR Lapangan (California Bearing Ratio)	90,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Hand Boring	75,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	175,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Coredrill Aspal	175,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Hammer Test	25,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Timbangan Elektris	45,000	Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Alat Speedy (kadar air lapangan)	50,000	Per Pemakaian

4 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN				
	PEMERIKSAAN/JENIS PARAMETER	TARIF BAHAN (Rp)	TARIF ALAT (Rp)	JASA PEMERIKSAAN (Rp)
	A. Harga dan Parameter Laboratorium Kesehatan			
	1) Biologi			
	a. Caliform			
	- Metode H2S	20,000	15,000	15,000
	- Metode Tb Ganda	160,000	50,000	65,000
	b. E.Cole			
	- Metode Tb. Ganda	160,000	50,000	65,000
	2) Fisik			
	a. Bau	-	-	10,000
	b. Rasa	-	-	10,000
	c. Suhu	-	10,000	5,000
	d. TDS	-	12,000	8,000
	e. Turbidity	-	12,000	8,000
	3) Kimia			
	a. PH	-	10,000	10,000
	b. Zat Organik	15,000	10,000	25,000
	c. Kesadahan	15,000	10,000	20,000
	d. Kalsium (Ca)	15,000	10,000	20,000
	e. Besi (Fe)	25,000	10,000	25,000
	f. Mangan (Mn)	10,000	10,000	15,000
	g. Tembaga (Cu)	35,000	10,000	20,000
	h. Seng (Zn)	30,000	10,000	25,000
	i. Klorida (Cl)	15,000	10,000	20,000
	j. Sulfat (SO4)	30,000	10,000	20,000
	k. Fluorida (F)	30,000	10,000	20,000
	l. Ammonia (NH4)	25,000	10,000	20,000
	m. Nitra (NO3)	18,000	10,000	22,000
	n Nitrit (NO2)	15,000	10,000	15,000
	o. Arsen (As)	35,000	25,000	20,000
	p. Timbal (Pb)	30,000	20,000	20,000
	q. Kromium (Cr)	25,000	15,000	20,000
	r. Sianida (Cn)	25,000	10,000	20,000
	s. Alamunium (Al)	25,000	15,000	20,000
	t. Selenium (Se)	25,000	25,000	15,000
	u. Kadmium (Cd)	30,000	20,000	15,000
	B. Penambahan Parameter Pemeriksaan Air			
	1) FISIK			
	a. Warna	-	10,000	15,000
	b. TSS	-	12,000	8,000
	c. DHL/Conductivity	-	12,000	8,000

1. Sapi/Kuda/Kerbau	5.000	Ekor	
2. Kambing/Domba/Babi	2.500	Ekor	

Paragraf 9
Pemanfaatan Aset Daerah
Pasal 104

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian dan/atau pemanfaatan aset daerah.

Pasal 105

Struktur dan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PENGGUNAAN TANAH			
	a. Penggunaan Tanah untuk Sarana Media Luar Ruang/Kegiatan, penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung/Tahun	100,000	Per m2 Per bulan	
	b. Penggunaan Tanah untuk:			
	1. Tempat Tinggal:	1 % NJOP PBB-P2 x Luas Tanah	Per Bulan	

	2. Usaha:	1,5 % NJOP PBB- P2 x Luas Tanah	Per Bulan	
	c. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan			
	- Luas Tanah s.d 25m ²	100,000	Per Hari	
	- Luas Tanah s.d 26m ² s.d 50m ²	200,000	Per Hari	
	- Luas Tanah s.d 51m ² s.d 100m ²	350,000	Per Hari	
	- Luas Tanah s.d 101 m ² ke atas	500,000	Per Hari	
II	PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	a. Graha Pemda	5,000,000	Per Hari	
	b. Graha PKK	2.000.000	Per Hari	
	c. Gedung SKB	750.000	Per Hari	
	d. Gedung Transito	500,000	Per Hari	
	e. Ruangan Rapat Umum Kantor Bupati	1,000,000	Per Hari	
	f. Ruang Pertemuan Salodik	300.000	Per Hari	
III	Pemakaian Lapangan Alun-alun Luwuk	1.000.000	Per Hari	
IV	PEMAKAIAN KENDARAAN, MESIN ALAT-ALAT LAINNYA:			
	1. Vibrator Roller Barata MGB 1 (2,5 Ton)	109,900	Per Jam	
	2. Tandem Roller Barata MGB 7 (7 Ton)	157,800	Per Jam	
	3. Motor Grader Komatsu GD 510 R (124 HP)	255,000	Per Jam	
	4. Motor Grader Komatsu GD 511 A (135 HP)	418,000	Per Jam	
	5. Wheel Loader Kawasaki 60ZIV (109 HP)	224,700	Per Jam	
	6. Dump Truck Isuzu EURO Z (3,5 Ton)	52,000	Per Jam	
	7. Dump Truck Mitsubishi PS120 (3,5 Ton)	34,000	Per Jam	
	8. Water Tank Truck Dyna Rino BY 43 (3.000 Liter)	70,200	Per Jam	
	9. Baby Roller Meiwa MG (600 kg)	29,000	Per Jam	
	10. Excavator Caterpillar 320D (138 HP)	336,000	Per Jam	
	11. Toronton Mitsubishi FN527 ML (220 BHP)	151,000	Per Jam	
	12. Mobil Penyiraman Tanaman/Pemadam Kebakaran	200,000	Per Jam	
	13. Mobil Tanki Air	75,000	Per Jam	
	14. Vibrator Roller Bomag BW 211D-40 (10 ton)	253,000	Per Jam	
	15. Excavator Caterpillar 320D-2 (142 HP)	404,250	Per Jam	
	16. Tandem Roller Bomag BW161AD (10 Ton)	290,300	Per Jam	
	17. Dump Truck Toyota Dyna 130 HT (3,5 Ton)	69,100	Per Jam	
	18. Bulldozer Komatsu D68ESS (155 HP)	517,500	Per Jam	
	19. Excavator Komatsu PC-200 (148 HP)	361,800	Per Jam	
V	PEMAKAIAN KENDARAAN, KAPAL CEPAT, KAPAL MOTOR DAN SARANA PERIKANAN:			
	a. Mobil Berpendingin Roda 6	400,000	Per hari Per Unit	
		8.000,000	Per bulan Per Unit	
	b. Speedboat Perikanan	750,000	Per Hari	
	c. Cold Storage Kapasitas 1,5 Ton	150,000	Per Hari	

	d. Freezer Kapasitas 1,5 Ton -2 Ton	1,500,000 150,000 500,000 1,500,000	Per Bulan Per Hari Per Minggu Per Bulan
	e. Chest Freezer	100,000	Per Hari Per Unit
	f. Sarana Perikanan :		
	1. Mesin Yanmar TS. 230 H - 300 H	200,000	Per Bulan
	2. Mesin Tempel 50 PK - 90 PK	500,000	Per Bulan
	3. Peralatan Pengolahan Ikan	75,000	Per Buah Per Bulan
	4. Peralatan Pengolahan Non Ikan	50,000	Per Buah Per Bulan
	g. Pemakaian Gedung Pengolahan Ikan		
	Pemakaian Bangsal Tempat Pengasapan Ikan	100,000	Per Bulan
VI	PEMAKAIAN RTH		
	1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	500,000	Per Hari
	2). Kegiatan Organisasi	250,000	Per Hari
	3). Wahana Bermain	100,000	Per Bulan
VII	Jasa Kandang penampungan Ternak Lebih dari 3 Hari		
	1) Sapi/Kerbau	3,000	Ekor/hari
	2) Kambing/Domba/Babi	15,000	Ekor/hari
	3) Unggas	500	Ekor/hari

Bagian Keenam
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 108

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 109

- (1) Pelayanan pemberian izin berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan, atau bangunan yang termasuk dalam penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 110

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk PBG.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. PBG.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk PBG, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks PBG; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 111

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. bangunan gedung:

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (ILO) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg; \text{ dan}$$
 - b. Prasarana bangunan gedung:

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun berjalan.

Pasal 112

Struktur dan besaran tarif perhitungan PBG ditetapkan sebagai berikut:

A. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Rumus :

$Nr = LLt \cdot (Ilo \cdot SHST) \cdot It \cdot Ibg$
$LLt = \sum (Lli + Lbi)$
$It = If \cdot \sum (bp + Ip) \cdot Fm$

Keterangan:

Nr	: Nilai Retribusi
LLt	: Luas Total Lantai
Ilo	: Indeks Lokalitas
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks Bangunan Gedung
Lli	: Luas Lantai Ke-i
Lbi	: Luas Basemen Ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: Bobot Parameter
Ip	: Indeks Parameter
Fm	: Faktor Kepemilikan

- Ilo	* Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
	* Pemerintah daerah menetapkan indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.
	* Nilai Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima).
- SHST	* SHST dipakai dalam perhitungan layanan PBG merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana.

	<p>* Pemerintah Daerah menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) setiap tahun berjalan, dan dapat langsung digunakan nilai tersebut sebagai SHST setiap tahunnya menyesuaikan dengan HSBGN tahun tersebut.</p>
	<p>* SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala setiap tahun.</p>

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

I. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) UNTUK BANGUNAN GEDUNG

RUMUS :

$$Nr = LLt \cdot (Ilo \cdot SHST) \cdot It \cdot Ibg$$

$$LLt = \sum \cdot (LLi + LBi)$$

$$It = If \cdot \sum (bp + Ip) \cdot Fm$$

Nr	:	Nilai Retribusi
LLt	:	Luas Total Lantai
Ilo	:	Indeks Lokalitas
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Lli	:	Luas Lantai Ke-i
Lbi	:	Luas Basemen Ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

- Ilo * Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- * Pemerintah daerah menetapkan indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.
- * Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi adalah 0,5% (nol koma lima per seratus persen)

- SHST** * SHST dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana.
- * Pemerintah Daerah menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) setiap tahun berjalan, dan dapat langsung digunakan nilai tersebut sebagai SHST setiap tahunnya menyesuaikan dengan HSBGN tahun tersebut.

B. Indeks Integritas (It)

$$It = If \cdot \sum (bp \cdot Ip) \cdot Fm$$

- it : Indeks Terintegrasi
 if : Indeks Fungsi
 bp : Bobot Parameter
 Ip : Indeks Parameter
 Fm : Faktor Kepemilikan

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	1,5	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Hunian b. > 100 m ² dan < 2 lantai	0,17	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Kecagamaan	0			b. Perorangan/Badan	1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.8				

C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
-------------------	---------------------

	(lbg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1.000	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862

27	1.645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan :

- * Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis
- * Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- * Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- * Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- * Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

E. Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{((\sum_{i=1}^n (L_{Li}) \cdot KL) + \sum_{i=1}^n (L_{Bi} \cdot K_{Bi}))}{((\sum_{i=1}^n (L_{Li}) \cdot \sum_{i=1}^n (L_{Bi})))}$$

Keterangan :

Koefisien Ketinggian BG : Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

L_{Li} : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

L_{Bi} : Luas Basemen ke-i

K_{Bi} : Koefisien Jumlah Lapis

F. Tarif Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Untuk Prasarana Bangunan Gedung

Rumus :

$$Nr = V \cdot I \cdot I_{bg}$$

Nr = Nilai Tarif

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HS_{pbg} = Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEK ERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PE KERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	10,000 /m	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	15,000 /m	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	15,000 /m	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	150,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Gerbang	150,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	8,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan upacara	8,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	8,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
4.	Konstruksi pekerasan aspal, beton	Aspal	12,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Beton	10,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		10,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Box culvert	20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservo	Kolam renang	20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

	ir bawah tanah	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		20,000 /m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	50,000 /5m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Cerobong	50,000 /5m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		50,000 /5m ²	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
14.	Konstruksi perkerasan	Tugu	100,000 /Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Patung	100,000 /Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di dalam persil	100,000 /Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di luar persil	100,000 /Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	100,000 /Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	100,000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas Unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m ²)	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	100,000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas Unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m ²)	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	1,500,000	/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas Unit. dikenakan biaya tambahan Rp 150.000/m ²)	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		50,000	/Unit Mesin	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		20,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
19.	Konstruksi antena radio	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:						
		Ketinggian 25-50 m	10,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	15,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	20,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 101-125 m	25,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	30,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
							0,325	0,225
		Ketinggian diatas 150 m	30,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat :						
		Ketinggian 0-50 m	4,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	8,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	12,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
Ketinggian diatas 100 m	16,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225			
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama						
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	5,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	10,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	20,000,000	/Unit	1.00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	
		Menara mandiri						

	a) Ketinggian kurang dari 25 m	5,000,000	/Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b) Ketinggian 25-50 m	10,000,000	/Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	c) Ketinggian diatas 50 m	20,000,000	/Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar	1,500,000	/Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran	10,000	/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Kolam tampung	20,000	/m ²	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan /silo	50,000	/m ³	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Pasal 113

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki PBG.

Pasal 114

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Penggunaan Tenaga Kerja asing

Pasal 115

- (1) Pelayanan Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 116

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 117

- (1) Besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD100 (seratus Dollar US) per orang per bulan dan per jabatan dibayarkan dimuka.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

Pasal 118

Struktur dan Besaran tarif layanan penggunaan jasa TKA ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengesahan Rencana Penggunaan TKA, Perpanjangan	Mata uang rupiah setara dengan 100 Us\$ saat penerbitan SKRD	Perorang/Perbulan /Perjabatan

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 119

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang pungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf f dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 120

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN
Pasal 121

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMERIKSAAN
Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 124

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, hak wajib pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 125

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 125, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 127

1. Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak.
2. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak tidak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
3. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
4. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
5. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
6. Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
7. Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
8. Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

9. Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 128

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan /atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 130

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan /atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 132

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terhutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 133

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 merupakan pendapatan negara .

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 135

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak yang masih terutang sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 136

Semua Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 133);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 151);
- d. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2548)
- e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2549);
- f. Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2631);
- g. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2736)
- h. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan

Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2737).

- i. Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2738)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai Opsen pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari Tahun 2025.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 91,04/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan

yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu alokasi sumber daya Daerah sebagai PAD yang efisien terlebih khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Daerah Kabupaten Banggai.

Sistem Pajak dan Retribusi.

Dalam rangka pengalokasian sumber daya di Kabupaten Banggai yang efisien, maka kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Sementara kewenangan pemungutan Opsen Pajak bagi kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil

pajak provinsi. penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level Pemerintah Daerah. Opsi Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berjumlah 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Hal tersebut bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan oleh Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Oleh karena itu penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Perda ini diharuskan untuk menyesuaikan dengan penetapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Pajak.

Dengan Perda ini mendorong peningkatan kualitas, kuantitas PAD dan didukung dengan sumber daya manusia pengelola Pajak dan Retribusi yang memadai serta pemanfaatan Informasi dan teknologi yang mendukung pencapaian target yang diharapkan dari pengumpulan salah satu sumber-sumber PAD yang ada. Sehingga dengan Perda yang ada ini diharapkan dapat mendukung pencapaian outcome dan/atau output pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Wajib Pajak/Objek Pajak dan Wajib Retribusi/Objek Retribusi di Daerah ini dapat selalu terukur agar tujuan yang diharapkan dengan pengaturannya dalam Perda ini dapat dilakukan secara optimal.

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara. Sehingga Perda ini diperlukan adanya Peraturan Pelaksanaannya agar menjawab penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud di atas. Dengan ditetapkannya dan diundangkannya Perda ini otomatis mengikat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 161